

**PENGARUH PENERAPAN *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2008**



Oleh
LARISA RAHMAN
200612043
SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
dalam Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
INDONESIA BANKING SCHOOL
JAKARTA
2010**

TANDA PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF

Nama : Larisa Rahman
NIM : 200612043
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2008.

Tanggal Ujian Komprehensif : 29 September 2010

Penguji

Ketua : Sparta, SE., ME

Anggota : 1. Erric Wijaya, SE., MM
2. Ira Geraldina, SE., Ak, MS. AK

Menyatakan bahwa mahasiswa dimaksud di atas telah mengikuti ujian komprehensif :

Pada : 29 September 2010

Dengan hasil : B +

Penguji,

Ketua,

(Sparta, SE., ME)

Anggota I,

Anggota II,

(Erric Wijaya, SE., MM)

(Ira Geraldina, SE., Ak, MS. AK)

**PENGARUH PENERAPAN *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2008**



Jakarta, 20 September 2010

Dosen Pembimbing Skripsi

(Ira Geraldina, SE., Ak, MS. AK)

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Larisa Rahman
NIM : 200612043
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2008.

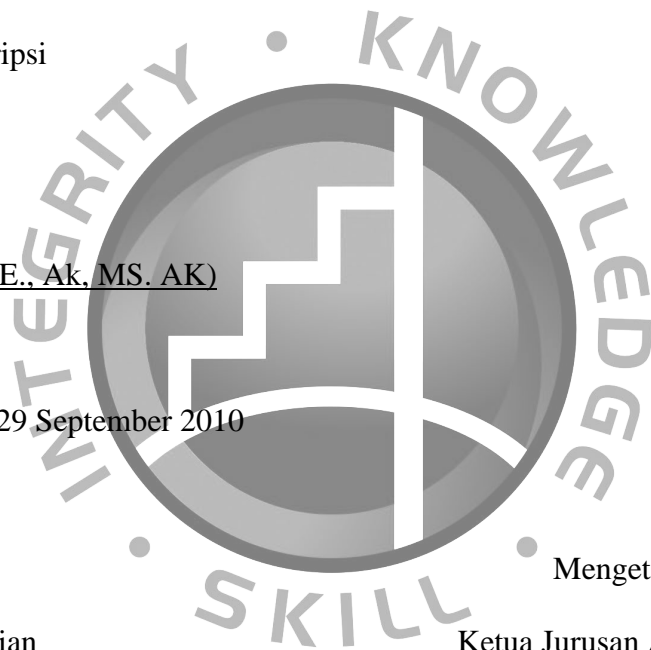
Pembimbing Skripsi

(Ira Geraldina, SE., Ak, MS. AK)

Tanggal Lulus : 29 September 2010

Ketua Panitia Ujian

(Sparta, SE., ME)



Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

(Etika Karyani, SE.Ak, MSM)

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2008”** dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Ira Geraldina, SE., Ak, MS. AK, selaku dosen pembimbing utama yang telah banyak memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Ibu Dr. Siti Sundari Arie selaku Ketua STIE Indonesia Banking School.
3. Ibu Etika Karyani, SE., Ak, MSM, selaku Ketua Jurusan Akuntansi STIE Indonesia Banking School dan sebagai pembimbing akademik.
4. Bapak Taufik Hidayat, SE., M.BankFin. yang telah memberikan saran dan pemahaman kepada penulis dalam penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Erric Wijaya, SE., MM, yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Sparta, SE., ME, yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penyempurnaan skripsi ini.

7. Terima kasih kepada Bapak Rochmat dan Mama Atim Parida, selaku orang tua, terima kasih atas segala bentuk dukungan dan doa yang tiada hentinya diberikan kepada penulis. Lutfi Rachmanto, ST sebagai kakak yang terus memberikan semangat dalam segala hal. Segenap keluarga besar yang telah membantu memberikan doa.
8. *My "SPY" Agents* tercinta Ria Kartika Sari, Nindya Putri Perwitasari, Indah Kandinie, dan sahabat-sahabat lain yang tersayang, Tiara, Icut, Sashi, Fattia, Fira, Ridya, Yuni, Tiur, Dicun, dan Blok M-ers (Millah, Mei, Frina, Iwe) yang selalu bersama-sama berjuang sejak awal di bangku kuliah.
9. Kawan-kawan Akuntansi 2006 lainnya yang selalu memberikan kebahagiaan.
10. Teman-teman seperjuangan lainnya yang telah banyak memberikan doa dan semangat.
11. *My lovely idols* yang selalu memberikan hiburan kepada penulis di saat-saat jenuh.
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran sangat penulis harapkan.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Jakarta, 13 September 2010

Penulis

ABSTRACT

The objectives of this research observed the influence of corporate governance implementation on corporate social responsibility disclosure. Management ownership, independent board of commissioner, audit committee, and external auditor are used as the proxy for corporate governance, with firm size and leverage as control variables. Corporate social responsibility disclosure as a dependent variable.

The population in this study is 138 manufacturer companies, which are listed at Indonesian Stock Exchange in 2008 based on Indonesia Capital Market Directory, such as basic industry & chemicals, miscellaneous industry, and consumer goods industry. The sample was taken using the method of purposive sampling and those meeting the selection criteria were also taken. The criteria are listed companies at Indonesian Stock Exchange in 2008 whose annual reports disclose CSR activities and can access at Capital Market Reference Center (CMRC). The sample used was of 84 manufacturer companies. This study observed three categories of item corporate social responsibility disclosure from Hackston & Milne (2006) research. These categories are environment, product, and linkage in community.

The results indicate that only an auditor external and firm size have a significant positive influence on the corporate social responsibility disclosure. On the other hand, the percentage of management ownership, the proportion of independent board of commissioner, audit committee, and leverage failed to show its significant effect.

Keywords : *Corporate governance, corporate social responsibility, management ownership, independent board of commissioner, audit committee, and external auditor.*

LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Larisa Rahman

NIM : 200612043

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan tata tertib STIE IBS.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar.

Penulis,

Materai Rp6000

(Larisa Rahman)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
<i>Abstract</i>	vii
Lembar Pernyataan Karya Sendiri	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II. LANDASAN TEORITIS	
A. Tinjauan Pustaka	11
1. Pengertian <i>Corporate Governance</i>	11
2. Kriteria <i>Good Corporate Governance</i>	13
3. Prinsip–Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	15
4. Tujuan dan Manfaat <i>Good Corporate Governance</i>	17
5. Faktor Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	18
6. Pengertian dan Tujuan Pengungkapan	28
7. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	30
8. Pentingnya <i>CSR</i>	31
9. Tujuan dan Manfaat <i>CSR</i>	34
10. <i>Corporate Governance</i> dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial	36
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	37
C. Kerangka Pemikiran	42

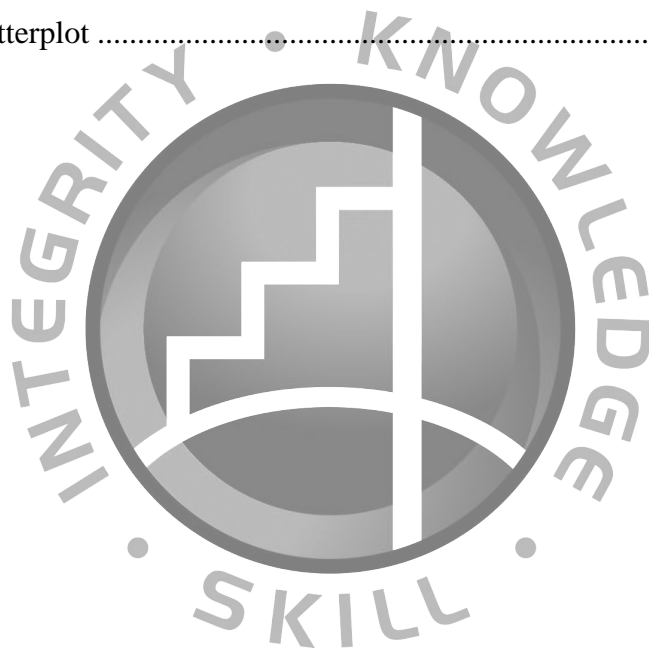
1. Variabel Dependen.....	43
2. Variabel Independen	44
3. Variabel Kontrol.....	49
D. Hipotesis.....	51
E. Spesifikasi Model.....	52
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Obyek Penelitian	53
B. Metode Pengumpulan Data	53
1. Populasi dan Sampel Penelitian	53
2. Data	54
C. Metode Analisis Data	54
1. Analisis Regresi	54
2. Uji Asumsi Klasik	55
a. Uji Normalitas	55
b. Uji Multikolinearitas	55
c. Uji Heteroskedastisitas	56
d. Uji Autokorelasi	56
3. Teknik Pengujian Hipotesis	57
a. Uji Koefisien Determinasi	57
b. Uji Statistik F.....	57
c. Uji Statistik t	58
BAB IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	60
B. Pembahasan Hasil Penelitian	61
1. Statistik Deskriptif	61
2. Uji Asumsi Klasik	64
a. Uji Normalitas	64
b. Uji Multikolinearitas	67
c. Uji Heteroskedastisitas	68
d. Uji Autokorelasi	70
3. Persamaan Regresi	70
4. Pengujian Hipotesis.....	72

a. Uji Koefisien Determinasi	72
b. Uji Statistik F.....	73
c. Uji Statistik t	74
5. Pembahasan	76
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	82
B. Keterbatasan Penelitian	83
C. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



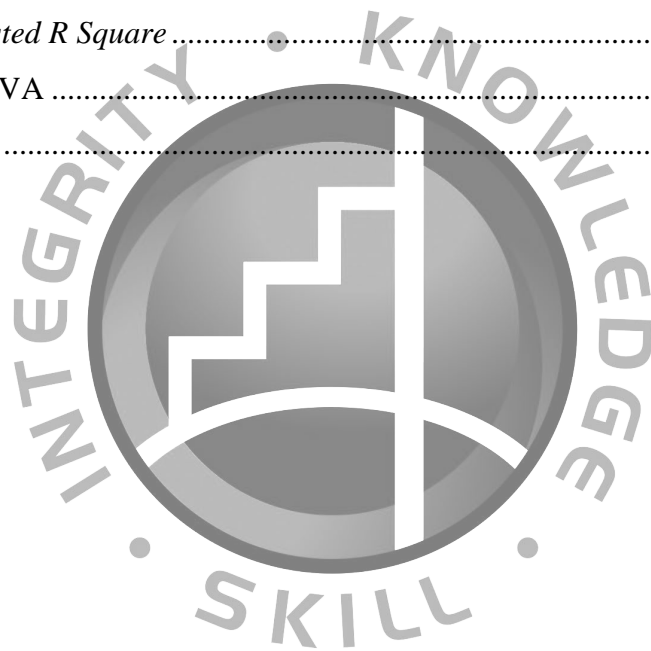
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hasil Riset Penerapan <i>Corporate Governance</i> di Beberapa Negara	13
Gambar 2.2 Kriteria <i>Good Corporate Governance</i> Menurut OECD.....	14
Gambar 2.3 Struktur <i>Corporate Governance</i> di Indonesia.....	28
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran.....	42
Gambar 4.1 <i>Normal Probably Plot of Standardized Residual</i>	65
Gambar 4.2 Histogram	66
Gambar 4.3 Scatterplot	68



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Pemilihan Sampel.....	61
Tabel 4.2	<i>Descriptive Statistics</i>	62
Tabel 4.3	<i>Kolmogorov-smirnov Test</i>	66
Tabel 4.4	Uji Multikolinearitas	67
Tabel 4.5	Uji Glesjer	69
Tabel 4.6	Uji Autokorelasi	70
Tabel 4.7	Hasil Analisis Regresi	71
Tabel 4.8	<i>Adjusted R Square</i>	73
Tabel 4.9	ANOVA	74
Tabel 4.10	Uji T	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu mengenai *corporate governance* mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Menurut James D. Wolfenshon Presiden Bank Dunia, tata kelola perusahaan yang buruk (*poor corporate governance*) diakui sebagai faktor utama yang pertama membawa krisis di Indonesia yang berat dan berkepanjangan (<http://www.cipe.org/events/speaker/baird.php3>). Salah satu faktor yang memperparah krisis yang melanda Indonesia yaitu rendahnya penerapan *corporate governance*, seperti kurangnya transparansi dalam pengelolaan perusahaan yang mengakibatkan kontrol publik menjadi sangat lemah. Hikmah dari adanya krisis ekonomi tersebut yaitu tumbuhnya kesadaran atas pentingnya *good governance*. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance*.

Survey Transparency International 2005 tentang *Corruption Perception Index* menempatkan Indonesia pada urutan 140 dari 159 negara yang disurvei dengan nilai 2,2. Sedangkan survey *CLSA Asia Pasific Markets 2005*, *Asian CG Association* menempatkan Indonesia pada urutan terbawah (peringkat 37 dari peringkat 40 di tahun 2004) diantara 10 negara Asia lainnya di bawah Malaysia, Thailand, dan Filipina. Selain itu, survei yang dilakukan oleh Bank Dunia–McKinsey Consulting Group mengindikasikan bahwa investor asing (Asia, Eropa, Amerika Serikat) bersedia memberikan premium sebesar 26% - 28% bagi perusahaan Indonesia yang secara efektif

telah mengimplementasikan praktik GCG (Dariyah, *FCGI* 2006 dalam Hidayah, 2008). Hal tersebut mengindikasikan bahwa negara–negara dan perusahaan–perusahaan yang menerapkan *corporate governance* dengan baik akan mempunyai akses yang lebih baik terhadap sumber dana internasional dibanding mereka yang tidak menerapkan *corporate governance* dengan baik. Hubungan yang harmonis antara pemilik dana dengan pengguna dana yang berlandaskan kepercayaan yang tumbuh dari adanya praktik GCG akan menjamin baik dalam hal kemudahan akses dana untuk penunjang investasi dan kegiatan usaha bagi perusahaan maupun penunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara.

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk mendorong penerapan GCG, antara lain pada tahun 1999 membentuk Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang telah mengeluarkan Pedoman *Good Corporate Governance*. Pada tahun 2004 KNKCG diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Pada tahun 2006, KNKG menyusun Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, yang merupakan panduan bagi perusahaan dalam membangun, melaksanakan dan mengkomunikasikan praktek GCG kepada pemangku kepentingan. Sejak tahun 2001, *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) sebuah lembaga swasta telah melakukan penelitian tentang proses penerapan GCG di perusahaan publik. Hasil risetnya, berupa pemeringkatan 10 besar perusahaan yang telah menerapkan GCG (Hidayah, 2008). Mei 2000, Bapepam mengeluarkan peraturan yang berisi rekomendasi kepada seluruh perusahaan publik untuk membentuk komite audit. Juli 2000, BEJ mengeluarkan ketentuan baru tentang persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan yang ingin diperdagangkan sahamnya di BEJ guna meningkatkan mutu *corporate governance* perusahaan publik di Indonesia.

Corporate governance merupakan suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan, atau peraturan yang mengatur hubungan baik hak maupun kewajiban para pemegang kepentingan internal dan eksternal perusahaan. *Corporate governance* merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan *stakeholders*. Pelaksanaan *good corporate governance* menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. *Good corporate governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder* (YPPMI & SC, 2002 dalam re-searchengines.com dalam Mintara, 2008).

Akhir-akhir ini terdapat kecenderungan (*trend*) meningkatnya tuntutan publik atas transparansi dan akuntabilitas perusahaan sebagai wujud implementasi *good corporate governance (GCG)*. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip *GCG*. Penyajian informasi akuntansi yang berkualitas dan lengkap dalam laporan tahunan merupakan salah satu wujudnya nyata implementasinya. Dengan adanya pengungkapan yang transparan akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Salah satu jenis pengungkapan yaitu pengungkapan sosial (*social disclosure*), dimana sangat berhubungan erat dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility (CSR)*. Penerapan *corporate social responsibility (CSR)* adalah bentuk implementasi salah satu prinsip *GCG* di perusahaan yaitu

pertanggungjawaban (*responsibility*). Tanggung jawab sosial dapat diartikan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab pada tindakan yang mempengaruhi konsumen, masyarakat, maupun lingkungan (Ivancevic, 1992 dalam Rosmasita, 2007). Kesadaran akan pentingnya penerapan *CSR* di era globalisasi ini, seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat terhadap produk (barang) yang ramah lingkungan dan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang membawa pada pilihan untuk melakukan proses pembangunan. Kebijakan ini selain membuahkan hasil seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi sosial, meningkatkan pendapatan per kapita, meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, mengurangi jumlah pengangguran, dan lain-lain, tetapi juga menimbulkan masalah-masalah sosial, seperti timbulnya praktek monopoli dan oligopoli, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebagai akibat aktivitas industri yang tidak mengindahkan keseimbangan ekologi, sebagian orang kehilangan pekerjaannya karena tenaga manusia telah tergantikan oleh tenaga mesin, tersingkirnya para petani dari sumber daya hidup mereka yang disebabkan oleh karena lahan mereka diambil-alih oleh industri, dan rendahnya kesejahteraan para buruh yang disebabkan oleh karena upah mereka yang sangat rendah.

Masalah-masalah sosial di atas, jika tidak diatasi dapat menghambat dan bahkan mengancam dunia usaha sendiri. Oleh karena itu, dunia usaha harus melakukan usaha-usaha nyata untuk mengatasi masalah-masalah sosial tersebut sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosialnya di dalam masyarakat. Masyarakat pun membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya dengan mengungkapkan informasi sosial di dalam laporan keuangan tahunannya. Akan tetapi, perusahaan kadangkala melalaikannya dengan alasan bahwa mereka tidak memberikan kontribusi terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini disebabkan hubungan perusahaan dengan lingkungannya bersifat *non reciprocal* yaitu

transaksi antara keduanya tidak menimbulkan prestasi timbal balik. Karena perusahaan memiliki peran selain memberi manfaat positif terhadap ekonomi, juga berkontribusi terhadap kondisi sosial masyarakat, maka diharapkan perusahaan tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan pemilik modal (investor dan kreditor) tetapi juga karyawan, konsumen serta masyarakat. Dengan kata lain, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap pihak-pihak di luar manajemen dan pemilik modal.

Ikatan Akutansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (revisi 2004) paragraf sembilan secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah sosial (Sulastini, 2007) :

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Dari pernyataan PSAK di atas, dapat menunjukkan bahwa kepedulian akuntansi terhadap masalah-masalah sosial yang merupakan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Namun, karena belum adanya standar baku yang merinci peraturan mengenai pengungkapan sosial mengakibatkan perusahaan hanya dengan sukarela mengungkapkannya (*voluntary disclosure*) dan nantinya akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan yang melakukannya. Hingga saat ini pun, muncul konsep *corporate social responsibility (CSR)* yang dalam akuntansi dinamakan *Social Responsibility Accounting (SRA)*.

Penelitian yang terkait dengan pengaruh *good corporate governance* terhadap *corporate social responsibility disclosure* telah dilakukan oleh Nurkhin (2009), dimana hasilnya menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institutional dengan pengungkapan *CSR*, sedangkan untuk struktur dewan komisaris dan

profitabilitas terbukti signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *CSR*. Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Fauzi, Mahoney, dan Rahman (2007), yang tidak menemukan hubungan antara kepemilikan institutional dengan pengungkapan *CSR* untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia. Menurutnya, sebagian besar investor institutional tidak mempertimbangkan *Corporate Social Performance* dalam keputusan investasinya. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2009), secara parsial hanya ukuran dewan komisaris yang berpengaruh signifikan, sedangkan struktur kepemilikan, komposisi dewan komisaris, dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *CSR*. Hal ini senada dengan hasil penelitian Sulastini (2007) yang menyebutkan bahwa ukuran dewan komisaris yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *CSR*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Angraini (2006) dan Rosmasita (2007), persentase kepemilikan manajemen berpengaruh signifikan terhadap kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan informasi sosial.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulisan skripsi ini diberi judul “Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2008”.

B. Perumusan Permasalahan

Bila dirumuskan, permasalahan utama yang akan dibahas pada penelitian ini :

1. Apakah kepemilikan manajemen mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 ?
2. Apakah komisaris independen mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 ?
3. Apakah komite audit mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 ?
4. Apakah auditor eksternal mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 ?
5. Apakah kepemilikan manajemen, komisaris independen, komite audit, dan auditor eksternal secara simultan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 ?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dilakukan dengan lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan yang ada, dimana dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah perusahaan-perusahaan yang termasuk industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 seperti yang tercantum dalam *Indonesia Capital Market Directory* yang meliputi kelompok saham industri dasar dan kimia, aneka industri, dan industri barang konsumsi. Dalam penelitian ini, hanya *item-item* pengungkapan tanggung jawab sosial sukarela dalam kategori lingkungan, produk, dan keterlibatan dalam komunitas saja yang diukur indeksinya, karena kategori-kategori tersebut berhubungan erat dengan pihak eksternal, sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial

perusahaan yang lebih mengutamakan hubungan antara perusahaan dengan pihak eksternal.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajemen terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh auditor eksternal terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008.
5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajemen, komisaris independen, komite audit, dan auditor eksternal secara simultan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008.

E. Manfaat Penelitian

▪ Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu akuntansi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

▪ Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat.

▪ Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen perusahaan dalam penerapan *good corporate governance* dan pengambilan kebijakan mengenai tanggung jawab sosial perusahaannya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah dan permasalahan penelitian yang terdiri dari perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis

Bab ini merupakan uraian landasan teori yang mendasari *corporate governance* dan pengaruhnya terhadap *social disclosure*, kajian penelitian-penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi uraian tentang objek penelitian, metode pengumpulan data yang terdiri dari jenis data, metode pengambilan sampel, serta metode analisis data.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi obyek penelitian serta analisis data dan pembahasan yang dilakukan, sesuai dengan alat analisis yang digunakan.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab terakhir ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa di masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian *Corporate Governance*

Latar belakang timbulnya isu *corporate governance* karena terjadi pemisahan antara kepemilikan (pemegang saham) dengan pengendalian perusahaan (manajer), atau yang lebih dikenal dengan istilah masalah keagenan (*agency theory*). Adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi ini akan memicu munculnya kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Dengan adanya asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) akan memberi kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) sehingga akan menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Dengan adanya *corporate governance* diharapkan dapat menjamin direksi dan manajer (pihak *insider*) agar bertindak yang terbaik bagi kepentingan investor (kreditur atau *shareholder*).

Kajian atas *corporate governance* mulai disinggung pertama kalinya oleh Berle dan Means pada tahun 1932 ketika membuat sebuah buku yang menganalisis terpisahnya kepemilikan saham (*ownership*) dan kontrol. Istilah *corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury Report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang sangat menentukan bagi praktik *corporate governance* di seluruh dunia (Tjager, 2003 dalam Deny, 2005 dalam Mintara, 2008).

Cadbury Committee mendefinisikan *corporate governance* (Tjager, 2003 dalam Deny, 2005 dalam Mintara, 2008) sebagai :

“*Corporate governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya”.

Menurut Syakhroza (2002) :

“*Corporate governance* adalah suatu sistem yang dipakai “*Board*” untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi (*directing, controlling, and supervising*) pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif – E3P dengan prinsip-prinsip *transparent, accountable, responsible, independent*, dan *fairness* – TARIF dalam rangka mencapai tujuan organisasi”.

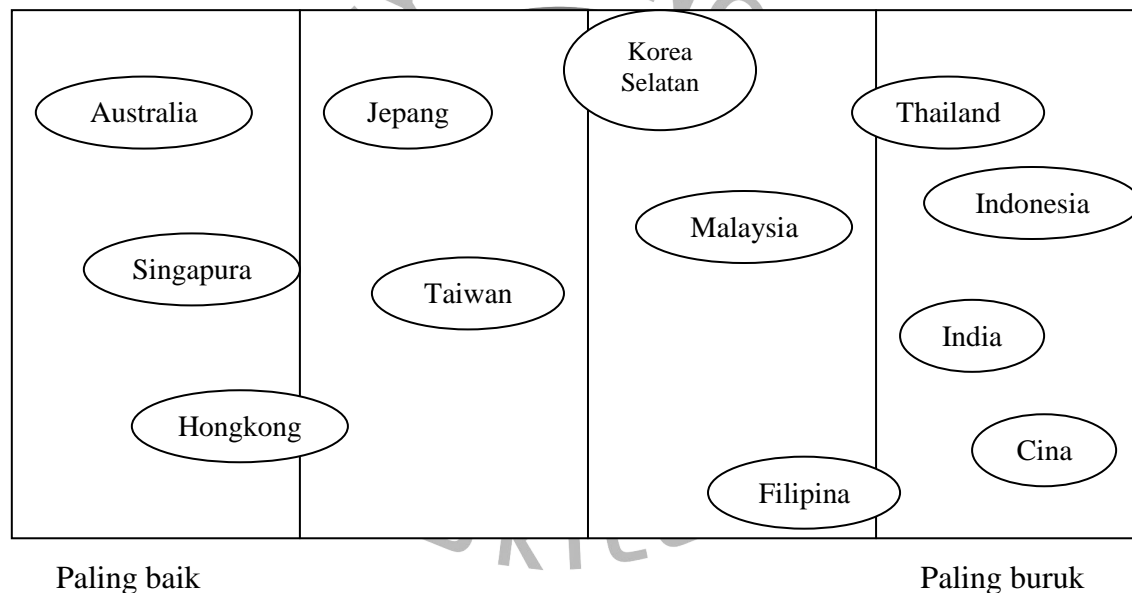
Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* :

“*Corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Dengan kata lain *corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. *Corporate governance* bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atas perusahaan (*stakeholder*)”.

Bank Dunia (2000) mendefinisikan *corporate governance* dari dua perspektif, yaitu perspektif publik dan *private*. *Corporate governance* menurut Bank Dunia merefleksikan hubungan interaksi antara *internal incentives* (yang didefinisikan sebagai pemain–pemain kunci di dalam perusahaan) dengan *external incentives* seperti kebijakan, peraturan, dan pasar yang bersama–sama mengatur dan mengendalikan perilaku dan kinerja perusahaan. Ini berarti agar diperoleh *good corporate governance* diperlukan lingkungan eksternal yang kondusif (mengarahkan dan mendorong serta secara efektif memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran) atas pemenuhan kriteria *GCG*.

Menurut hasil survei Pricewaterhouse Coopers tahun 1999 terhadap investor–investor internasional di Asia, menunjukkan bahwa Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terburuk dalam standar–standar akuntansi dan penataan, pertanggungjawaban terhadap para pemegang saham, standar–standar pengungkapan dan transparansi serta proses–proses kepengurusan perusahaan atau dengan kata lain terburuk pada *corporate governance* (Priantara, 2002). Suatu kajian lain menunjukkan bahwa tingkat perlindungan investor di Indonesia merupakan yang terendah di Asia Tenggara.

Gambar 2.1
Hasil riset penerapan *corporate governance* di beberapa negara



Sumber : http://www.fcgi.or.id/Indonesia/002_06_Di_Indonesia.htm dalam Diaz Priantara, 2002

2. Kriteria *Good Corporate Governance*

Kriteria minimal GCG secara internasional dirumuskan oleh *Ad-hoc Taskforce on Corporate Governance the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* dan disetujui oleh 29 negara pada bulan Mei 1999. Kelima kriteria tersebut adalah (Diaz Priantara, 2002):

1. *The rights of shareholders*

Hak untuk menerima informasi yang relevan mengenai perusahaan pada waktu yang tepat dan hak berpartisipasi dalam mengambil keputusan yang menyangkut perusahaan.

2. *The equitable treatment of shareholders*

Seluruh pemegang saham dengan kelas saham yang sama harus diperlakukan dengan adil, termasuk pemegang saham minoritas atau asing

3. *The role of stakeholders in corporate governance*

Kerangka kerja *GCG* harus dapat mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan *stakeholder* dalam menciptakan pekerjaan, kemakmuran, dan perusahaan yang sehat secara finansial.

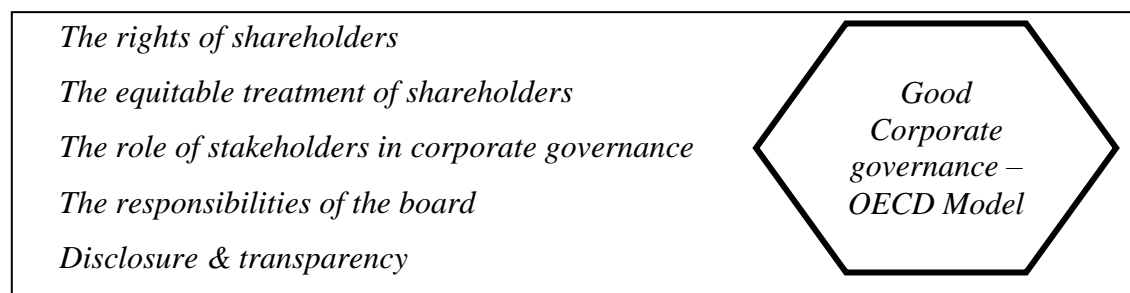
4. *The responsibilities of the board*

Kerangka kerja *corporate governance* harus menjamin adanya arahan, bimbingan, pengaturan, pemantauan, pengawasan, dan akuntabilitas yang strategis atas jalannya perusahaan.

5. *Disclosure & transparency*

Segala hal yang material terhadap kinerja perusahaan harus dilaporkan secara akurat dan tepat waktu atas, kepemilikan dan *corporate governance*, laporan keuangan harus diaudit oleh pihak yang independen

Gambar 2.2
Kriteria *good corporate governance* menurut *OECD*



Sumber : Diolah kembali dari data yang disajikan pada *OECD* (1999: 15-23) dalam Diaz Priantara (2002)

3. Prinsip - Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip dasar *GCG* yang disusun terutama oleh *OECD* terdiri dari lima aspek (Wardani, 2008) :

1. Disclosure / Transparency (Keterbukaan / Transparansi)

Transparansi adalah adanya pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Accountability (Akuntabilitas)

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi *monitoring*, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibility (Responsibilitas)

Responsibility (responsibilitas) adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika dan memelihara bisnis yang sehat.

4. Independency (Independen)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independen diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini menuntut adanya rentang kekuasaan antara komposisi komisaris, komite dalam komisaris, dan pihak luar seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus obyektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihak tertentu.

5. Fairness (Keadilan)

Prinsip keadilan (*fairness*) merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham. Keadilan yang diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dari kecurangan, dan kesalahan perilaku *insider*. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

4. Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Ada lima macam tujuan utama *good corporate governance* (Ibid dalam Emirson, 2006) :

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholders* nonpemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Di Indonesia, tujuan dan manfaat *GCG* dapat diketahui dari Keputusan Menteri Negara BUMN melalui SK No. Keputusan 23/M-PM. PBUMN/2000, Pasal 6, penerapan *GCG* dalam rangka menjaga kepentingan PESERO bertujuan untuk (Emirson, 2006) :

1. Pengembangan dan peningkatan nilai perusahaan
2. Pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efisien dan efektif
3. Peningkatan disiplin dan tanggung jawab dari organ PESERO dalam rangka menjaga kepentingan perusahaan termasuk pemegang saham, kreditur, karyawan, dan lingkungan dimana PESERO berada, secara timbal balik sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing
4. Meningkatkan kontribusi PESERO bagi perekonomian nasional
5. Meningkatkan iklim investasi
6. Mendukung program privatisasi

Di samping hal-hal tersebut di atas, *GCG* juga dapat (www.madani-ri.com dalam Mintara, 2008) :

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya

yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para *stakeholder* (para pihak yang berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

5. Faktor Penerapan *Good Corporate Governance*

Keberhasilan penerapan *GCG* juga memiliki prasyarat tersendiri. Ada dua faktor yang memegang peranan yaitu faktor eksternal dan internal (www.madani-ri.com dalam Mintara, 2008).

1. Faktor Eksternal

Yang dimaksud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan *GCG*. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain :

- a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b. Dukungan pelaksanaan *GCG* dari sektor publik / lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Governance* dan *Clean Government* menuju *Good Government Governance* yang sebenarnya.
- c. Terdapatnya contoh pelaksanaan *GCG* yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standar pelaksanaan *GCG* yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, semacam *benchmark* (acuan).
- d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan *GCG* di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi *GCG* secara sukarela.
- e. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi *GCG* terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik sangat

mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam implementasi *GCG*.

2. Faktor Internal

Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek *GCG* yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud :

- a. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *GCG* dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai *GCG*.
- c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar *GCG*.
- d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG), ringkasan kerangka kerja kode *Good Corporate Governance* versi 3.1 adalah sebagai berikut:

1. Hak Pemegang Saham dan RUPS

Hak pemegang saham : hak pemegang saham harus dilindungi dan pemegang saham harus dapat melaksanakan hak mereka melalui prosedur yang cocok / tepat dan yang dapat diandalkan yang telah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan publik.

- 1.1. Perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham : pemegang saham harus diperlakukan secara adil di bawah prinsip keadilan pemegang saham. Para pemegang saham dengan demikian harus memegang, bebas pelanggaran, berhak untuk melaksanakan satu suara per saham.
- 1.2. Tanggung jawab pemegang saham : pemegang saham yang mempunyai kepentingan untuk mengontrol perusahaan harus sadar akan tanggung jawab

mereka sebagai pemegang saham pada waktu melakukan berbagai pengaruh atas manajemen perusahaan dengan menggunakan hak suara mereka. Pemegang saham minoritas juga mempunyai tanggung jawab yang sama bahwa mereka tidak menyalahgunakan hak mereka sesuai dengan UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal.

- 1.3. RUPS : RUPS tahunan harus diadakan secara tetap setiap tahun dan dalam hubungannya dengan pemenuhan Undang-Undang Perseroan Terbatas dimana RULBPS juga harus diadakan sesuai dengan UU dan dari waktu ke waktu apabila situasi meminta semua persyaratan untuk panggilan RUPS tahunan dan bahan-bahan untuk laporan tahunan perusahaan harus lengkap.

2. Komisaris (Dewan Komisaris)

- 2.1. Fungsi : Komisaris harus dapat bertanggung jawab dan mempunyai otoritas untuk melakukan supervisi atas kebijakan dan tindakan direksi apabila diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut, komisaris dapat mengikuti prosedur-prosedur yang diterapkan, meminta saran kepada profesional yang independen dan/atau komite khusus yang ada. Setiap anggota komisaris, haruslah seorang yang mempunyai karakter yang baik, dan pengalaman di bidangnya. Setiap anggota komisaris dan komisaris sebagai suatu badan harus melaksanakan tugasnya dengan hasil paling baik bagi kepentingan perusahaan dan pemegang saham; juga harus menjamin bahwa melaksanakan tanggung jawab sosial (seperti bertindak sebagai warga negara yang baik dimana perusahaan beroperasi) dan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan perusahaan.

- 2.2. Komposisi : Komposisi komisaris harus mempertimbangkan efektivitas dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Paling sedikit 20% anggota komisaris harus berasal dari luar untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pertimbangan-pertimbangan yang diambil. Adanya perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan harus dicatat dalam notulen rapat komisaris. Anggota yang berasal dari luar harus independen dari direksi dan pengendalian pemegang saham dan tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kinerjanya untuk bertindak atas nama perusahaan.
- 2.3. Rapat-rapat : Rapat dewan komisaris harus diselenggarakan secara teratur, misalnya paling sedikit sekali dalam sebulan. Komisaris harus menggunakan prosedur-prosedur dalam rapat komisaris dan setiap anggota komisaris harus diberi salinan notulen pada setiap rapat komisaris.
3. Direksi (Dewan Direksi)
- 3.1. Fungsi : Direksi ditugaskan dengan seluruh manajemen perusahaan. Untuk membantunya, direksi dapat menggunakan prosedur-prosedur yang telah digunakan, menggunakan profesional independen atau komite khusus yang ada. Setiap anggota direksi harus orang yang berkarakter baik dan pengalaman di bidangnya. Direksi harus mengelola perusahaan dengan kepentingan yang paling baik bagi perusahaan dan pemegang saham; juga harus melaksanakan tanggung jawab sosial (seperti bertindak sebagai warna negara yang baik dimana perusahaan beroperasi) dan mempertimbangkan kepentingak berbagai pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan perusahaan.
- 3.2. Komposisi : Komposisi dewan direksi harus mempertimbangkan efektivitas dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Paling sedikit 20% anggota direksi harus

direksi direktur dari luar agar meningkatkan (a) efektivitas peranan manajemen dan (b) transparansi keputusan-keputusan yang diambil; jumlah direksi dari luar harus dapat menjamin bahwa suara mereka akan ikut menentukan keputusan-keputusan penting dalam rapat direksi. Anggota yang berasal dari luar harus independen dari komisaris dan pengendalian pemegang saham dan tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kinerjanya untuk bertindak atas nama perusahaan.

- 3.3. Rapat-rapat : Direksi secara prinsip mengadakan rapat direksi paling sedikit seminggu sekali dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu kepada setiap anggota direksi. Direksi harus membuat prosedur yang menjamin bahwa setiap anggota direksi mempunyai akses terhadap informasi perusahaan secara tepat waktu dalam bentuk dan kualitas yang cocok yang memudahkan direksi untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Direksi harus menggunakan prosedur-prosedur dalam rapat direksi dan setiap anggota direksi harus diberi salinan notulen rapat direksi.
- 3.4. Pengendalian Internal : Direksi harus menyelenggarakan dan menegakkan sistem pengendalian internal untuk melindungi investasi dan aset-aset perusahaan. Hal ini bukan hanya pengendalian keuangan tetapi juga pengendalian atas ketaatan dan operasional dan manajemen risiko.

4. Sistem Audit

4.1. Auditor Eksternal

Auditor eksternal harus ditunjuk dalam RUPS. Persyaratan, penunjukan, dan penggajiannya ditentukan oleh komisaris. Auditor yang ditunjuk harus auditor yang telah mendapatkan register dari Departemen Keuangan dan terdaftar di Bapepam.

Auditor dalam melaksanakan tugasnya harus secara adil (*fair*) dan akurat dan menjaga independensinya dari manajemen, direksi, komisaris, pemegang saham, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan.

4.2. Komite Audit

Komisaris dapat membentuk sebuah komite audit yang terdiri dari anggota-anggota komisaris, auditor dari luar, dan staf auditor internal yang senior. Komite ini independen terhadap direksi dan memberi laporan hanya kepada komisaris. Setiap anggota komite audit hanya tunduk pada kesepakatan atau suara bulat dari komisaris.

Tugas komite audit meliputi :

- a. Menegakkan disiplin organisasi dan lingkungan pengendalian untuk mencegah kecurangan (*fraud*) dan penyimpangan (*abuse*).
- b. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan.
- c. Me-*review* ruang lingkup, keakuratan dan efektivitas biaya atas audit eksternal, dan independensi dan obyektivitas auditor eksternal.

4.3. Kerahasiaan

Auditor eksternal dan internal harus menyatakan paling tidak yang diminta oleh undang-undang, berbagi informasi rahasia yang didapatkan sewaktu menjalankan tugas.

4.4. Peraturan Audit

RUPS harus menerapkan peraturan-peraturan internal yang diamanatkan untuk mengatur semua aspek audit, termasuk kualifikasi, hak, kewajiban, tanggung jawab, dan kegiatan auditor eksternal dan internal.

5. Sekretaris Perusahaan

5.1. Fungsi

Berdasarkan peraturan Bapepam, setiap perusahaan publik diminta untuk membentuk sekretaris perusahaan yang bertindak sebagai petugas penghubung dengan investor. Sekretaris perusahaan juga bertindak sebagai petugas yang mematuhi ketentuan-ketentuan undang-undang dan penyelenggara dokumen perusahaan, seperti daftar pemegang saham, daftar khusus pemegang saham, dan notulen RUPS.

5.2 Persyaratan

Sekretaris perusahaan harus lulusan dari fakultas hukum dan atau fakultas ekonomi atau fakultas lain yang dapat diterima oleh direksi.

5.3. Pertanggungjawaban

Sekretaris perusahaan dipilih dan diangkat oleh direksi dan bertanggung jawab secara langsung kepada direksi tetapi dalam mengambil tindakan harus memperhatikan secara teratur dan penuh saran-saran dari komisaris.

5.4. Peranan Sekretaris Perusahaan dalam Keterbukaan Informasi

Sekretaris perusahaan harus melihat usaha-usaha perusahaan dalam ketaatan mengenai keterbukaan informasi yang diminta oleh undang-undang yang berlaku dan peraturan yang mempunyai kekuatan hukum.

5.5. Sistem Pengendalian Informasi Internal

Sistem pengendalian yang tepat harus diselenggarakan oleh direksi sehingga semua informasi perusahaan yang secara material penting dapat secara cepat dikirim ke sekretaris perusahaan.

6. Pihak-pihak yang Berkepentingan (Stakeholder)

6.1. Hak-hak pihak-pihak yang berkepentingan

Hak-hak pihak-pihak yang berkepentingan menurut hukum dan menurut perjanjian harus dilindungi dan pihak-pihak yang berkepentingan harus diberi ganti rugi atas pelanggaran haknya secara wajar.

6.2. Partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengawasan manajemen

Pihak-pihak, seperti karyawan (sebagai badan kolektif) dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan lainnya dalam perusahaan harus diberi kesempatan yang wajar untuk mengawasi dan memberikan masukan kepada manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan harus bekerja sama untuk mendapatkan manfaat bersama.

7. Keterbukaan (Disclosure)

7.1. Bahan-bahan yang penting untuk pembuatan keputusan

Perusahaan harus melakukan inisiatif untuk membuka, tidak hanya diminta undang-undang tetapi juga bahan-bahan yang penting bagi investor, pemegang saham, kreditor, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dalam membuat keputusan.

7.2. Keterbukaan mengenai struktur *good governance* perusahaan

Perusahaan harus melengkapi diri dengan struktur pengelolaan perusahaan yang sehat, secara aktif membuka struktur itu sehingga pihak-pihak yang dipengaruhi, seperti pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dapat dengan mudah melakukan evaluasi.

7.3. Bahan yang akurat dan tepat waktu

Perusahaan harus membuka informasi material melalui laporan tahunan dan laporan keuangan kepada pemegang saham seperti laporan kepada Bapepam, bursa efek yang berkaitan, dan masyarakat secara tepat waktu, akurat, mudah dimengerti, dan obyektif.

7.4. Laporan Tahunan

Pasal 56 Undang-undang Pasar Modal memberikan batasan-batasan minimal isi dari laporan tahunan perusahaan. Namun, laporan tahunan diharapkan juga memuat penjelasan tentang :

- a. Strategi dan tujuan perusahaan;
- b. Status pemegang saham, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak pemegang saham;
- c. Pemegang saham silang dan jaminan atas hutang secara silang;
- d. Penilaian manajemen terhadap izin usaha dan faktor risiko;
- e. Informasi tentang direksi dan karyawan;
- f. Sistem penggajian untuk auditor eksternal, auditor internal, dan direksi;
- g. Evaluasi perusahaan oleh auditor eksternal, badan pemeringkat kredit, dan direksi;
- h. Tuntutan-tuntutan yang material dan kasus-kasus di pengadilan; dan
- i. Perbedaan-perbedaan, jika ada, antara sistem *corporate governance* perusahaan dengan kode *corporate governance* yang ada.

7.5. Keterbukaan Mengenai Informasi yang Sensitif terhadap Harga

Perusahaan harus menjamin bahwa semua informasi yang sensitif terhadap harga saham diselenggarakan secara hati-hati sampai pengumuman kepada masyarakat dilakukan. Apabila kehati-hatian tidak terselenggara sampai transaksi istimewa

terjadi atau bahan khusus tersebar maka perusahaan harus melakukan pengumuman peringatan untuk mencegah terjadinya pasar yang semu.

8. Kerahasiaan

8.1. Persyaratan Kerahasiaan

Komisaris dan direksi mempunyai tanggung jawab atas kerahasiaan informasi perusahaan. Informasi yang bersifat rahasia yang diterima oleh anggota komisaris atau direksi harus dijaga kerahasiaannya, kecuali informasi tersebut diminta oleh undang-undang dibuka atau dimasukkan ke masyarakat.

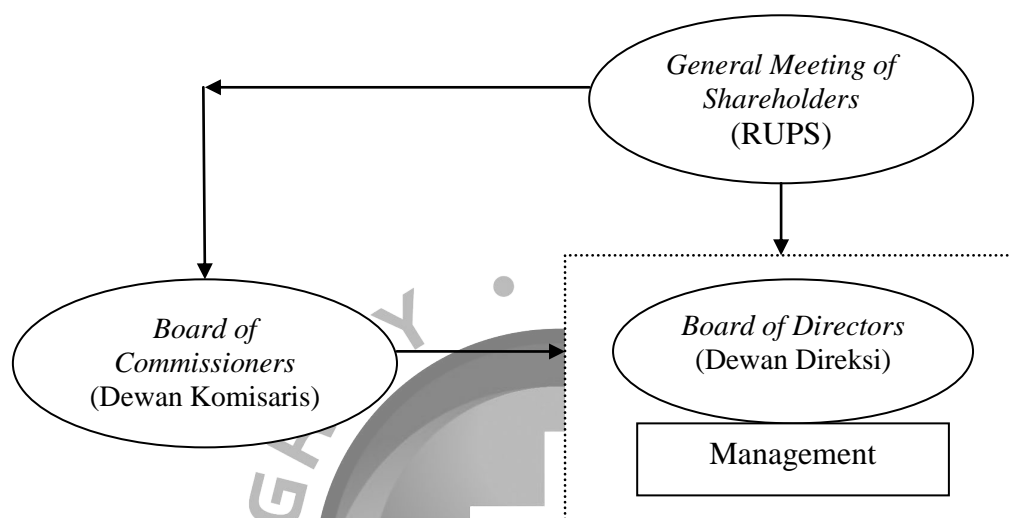
9. Informasi orang dalam

9.1. Anggota komisaris dan direksi yang mempunyai saham di perusahaan dan "orang dalam" lainnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 95 Undang-undang Pasar Modal tidak boleh mengambil manfaat dari informasi orang dalam, dalam transaksi sahamnya.

Dalam suatu perusahaan, dewan memegang peranan yang sangat signifikan bahkan peran yang utama dalam penentuan strategi perusahaan tersebut. Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem *two-tier board system*, dimana dewan terdiri dari dewan komisaris dan dewan direksi. Dewan komisaris merupakan pihak yang melakukan fungsi *monitoring* terhadap kinerja manajemen, sedangkan dewan direksi merupakan pihak yang melakukan fungsi operasional perusahaan sehari-hari (Wardhani, 2007). Baik dewan komisaris dan dewan direksi bertanggungjawab terhadap RUPS (kedudukannya sejajar). Bila ditinjau dari perspektif *good governance*, kedudukan yang sejajar ini dapat mengakibatkan pelaksanaan fungsi pengendalian (*control*) berjalan kurang efektif karena bisa saja dewan komisaris dianggap dewan direksi sebagai partner

kerja, bukan sebagai pengawas kerja dewan direksi. Hal ini dapat menjadi salah satu hambatan untuk melaksanakan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia (Arifin, 2005).

Bagan 2.3
Struktur *Corporate Governance* di Indonesia (*Dual-Board System*)



Sumber : Tjager dkk (2003) dan Syakhroza (2005)

6. Pengertian dan Tujuan Pengungkapan

Evans (2003) dalam Suwardjono (2005) dalam Mintara (2008) mengartikan pengungkapan sebagai berikut.

“Disclosure means supplying information in the financial statement, including the statements themselves, the notes to the statements, and the supplementary disclosures associated with the statements. It does not extend to public or private statement made by management or information provided outside the financial statement”.

Pengungkapan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pengungkapan yang sifatnya wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan yang sifatnya sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan ketentuan yang harus diikuti oleh setiap perusahaan atau institusi yang berisi tentang hal-hal yang harus dicantumkan dalam laporan keuangan menurut standar yang berlaku. Sedangkan pengungkapan yang bersifat

sukarela ini tidak disyaratkan oleh standar, tetapi dianjurkan dan akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan yang melakukannya.

Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda (Suwardjono, 2005 dalam Mintara, 2008), diantaranya.

1. Tujuan melindungi

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomi yang melandasi suatu pos statement keuangan. Tujuan melindungi biasanya menjadi pertimbangan badan pengawas yang mendapat otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap pasar modal seperti SEC atau Bapepam.

2. Tujuan informatif

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut. Tujuan ini biasanya melandasi penyusun standar akuntansi untuk menentukan tingkat pengungkapan.

3. Tujuan kebutuhan khusus

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi

tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.

7. Pengertian *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Adanya hubungan antara *GCG* dengan *corporate social responsibility (CSR)* terkait dengan salah satu prinsip *GCG* yaitu *responsibility* (tanggung jawab). Prinsip *responsibility* menunjuk pada kepentingan *stakeholders* perusahaan. *Stakeholders* di sini mencakup pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah karyawan, pelanggan, konsumen, masyarakat di lingkungan sekitarnya serta pemerintah selaku *regulator*. Jadi, dapat dikatakan bahwa prinsip *responsibility* dalam *GCG* melahirkan gagasan *corporate social responsibility (CSR)* atau peran serta perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya. Dalam gagasan *CSR* perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab terhadap nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan ke dalam kondisi keuangan perusahaan saja, namun juga tanggung jawab perusahaan pada sosial dan lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). *CSR* dapat dianggap sebagai investasi masa depan bagi perusahaan. Minat para pemilik modal dalam menanamkan modal di perusahaan yang telah menerapkan *CSR* lebih besar, dibandingkan dengan yang tidak menerapkan *CSR*. Melalui program *CSR* dapat dibangun komunikasi yang efektif dan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat.

CSR menurut *World Business Council on Sustainable Development (WBCSD)* adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk berperilaku etis (*behavioral ethics*) dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic development*). Komitmen lainnya adalah meningkatkan kualitas hidup karyawan dan

keluarganya, komunitas lokal serta masyarakat luas. Harmonisasi antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya dapat tercapai apabila terdapat komitmen penuh dari *top management* perusahaan terhadap penerapan *CSR* sebagai akuntabilitas publik. Terdapat dua hal yang dapat mendorong perusahaan menerapkan *CSR*, yaitu : bersifat dari luar perusahaan (*external drivers*) dan dari dalam perusahaan (*internal drivers*). Termasuk kategori pendorong dari luar, misalnya adanya regulasi, hukum, dan diwajibkannya analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) (<http://www.kemitraan.or.id/newsroom/media-news/implementasi-good-corporate-governance-melalui-corporate-social-responsibility/>).

Sedangkan pengertian *Corporate Social Responsibility (CSR)* (Darwin, 2004 dalam Anggraini, 2006) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang disebut *sustainability reporting*. *Sustainability reporting* adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi, dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). *Sustainability reporting* meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan, dan pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi.

8. Pentingnya *CSR*

Lahirnya *CSR* dipengaruhi oleh fenomena DEAF (yang dalam Bahasa Inggris berarti tuli) di dunia industri. DEAF adalah akronim dari Dehumanisasi, Emansipasi, Aquariumisasi, dan Feminisasi (Suharto, 2007a: 103-4 dalam Suharto, 2008) :

a. Dehumanisasi industri

Efisiensi dan mekanisasi yang semakin menguat di dunia industri telah menciptakan persoalan-persoalan kemanusiaan baik bagi kalangan buruh di perusahaan, maupun bagi masyarakat di sekitar perusahaan. “Merger mania” dan perampangan perusahaan telah menimbulkan gelombang PHK dan pengangguran. Ekspansi dan eksploitasi industri telah melahirkan ketimpangan sosial, polusi dan kerusakan lingkungan yang hebat.

b. Emansipasi hak-hak publik

Masyarakat kini semakin sadar akan haknya untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas berbagai masalah sosial yang seringkali ditimbulkan oleh beroperasinya perusahaan. Kesadaran ini semakin menuntut kepedulian perusahaan bukan saja dalam proses produksi, melainkan pula terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkannya.

c. Aquariumisasi dunia industri

Dunia kerja kini semakin transparan dan terbuka laksana sebuah akuarium. Perusahaan yang hanya memburu rente ekonomi dan cenderung mengabaikan hukum, prinsip etis dan filantropis tidak akan mendapat dukungan publik. Bahkan dalam banyak kasus, masyarakat menuntut agar perusahaan seperti ini ditutup.

d. Feminisasi dunia kerja

Semakin banyaknya wanita yang bekerja semakin menuntut penyesuaian perusahaan bukan saja terhadap lingkungan internal organisasi, seperti pemberian cuti hamil dan melahirkan, keselamatan dan kesehatan kerja, melainkan pula terhadap timbulnya biaya-biaya sosial, seperti penelantaran anak, kenakalan remaja, akibat berkurangnya atau hilangnya kehadiran ibu-ibu di rumah dan tentunya di lingkungan masyarakat. Pendirian fasilitas pendidikan, kesehatan dan perawatan anak (*child care*) atau pusat-

pusat kegiatan olah raga dan rekreasi bagi remaja adalah beberapa bentuk respon terhadap isu ini.

Adapun alasan-alasan perusahaan mengungkapkan kinerja sosial secara sukarela antara lain (Sulastini, 2007) :

1. *Internal Decision Making* : Manajemen membutuhkan informasi untuk menentukan efektivitas informasi sosial tertentu dalam mencapai tujuan sosial perusahaan. Walaupun hal ini sulit diidentifikasi dan diukur, namun analisis secara sederhana lebih baik daripada tidak sama sekali.
2. *Product Differentiation* : Manajer perusahaan memiliki insentif untuk membedakan diri dari pesaing yang tidak bertanggung jawab secara sosial kepada masyarakat. Akuntansi kontemporer tidak memisahkan pencatatan biaya dan manfaat aktivitas sosial perusahaan dalam laporan keuangan, sehingga perusahaan yang tidak peduli sosial akan terlihat lebih sukses daripada perusahaan yang peduli. Hal ini mendorong perusahaan yang peduli sosial untuk mengungkapkan informasi tersebut sehingga masyarakat dapat membedakan mereka dari perusahaan lain.
3. *Enlightened Self Interest* : perusahaan melakukan pengungkapan untuk menjaga keselarasan sosialnya dengan para stakeholder karena mereka dapat mempengaruhi pendapatan penjualan dan harga saham perusahaan. Pertanggungjawaban sosial berhubungan juga dengan *social contract theory*. Menurut teori ini, diantara bisnis perusahaan dan masyarakat terdapat suatu kontrak sosial yang secara implisit maupun eksplisit. Dimana dalam kontrak sosial, akuntansi sosial digunakan sebagai serangkaian teknik pengumpulan dan pengungkapan data sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi kinerja sosial organisasi dalam memberi penilaian mengenai kelayakan operasi organisasi. Disamping itu, pertanggungjawaban

perusahaan diperlukan untuk menilai apakah kegiatan perusahaan telah memenuhi ketentuan, standar, dan peraturan yang berlaku. Misalnya mengenai polusi, kesehatan dan keselamatan, bahaya penggunaan bahan-bahan yang beracun.

9. Tujuan dan Manfaat CSR

Tujuan dari CSR (Rosmasita, 2007) :

1. Untuk meningkatkan citra perusahaan dan mempertahankan, biasanya secara implisit, asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik.
2. Untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi dan masyarakat. Keberadaan kontrak sosial ini menuntut dibebaskannya akuntabilitas sosial.
3. Sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada investor.

Untuk itulah maka pertanggungjawaban sosial perusahaan perlu diungkapkan dalam perusahaan sebagai wujud pelaporan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Manfaat yang diperoleh bagi perusahaan dengan mengimplementasikan CSR (<http://www.kemitraan.or.id/newsroom/media-news/implementasi-good-corporate-governance-melalui-corporate-social-responsibility/>) :

1. Keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra (*image*) yang positif dari masyarakat luas.
2. Perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap kapital (modal).
3. Perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas.
4. Perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*).

Jika dikelompokkan, sedikitnya ada empat manfaat *CSR* terhadap perusahaan (Wikipedia, 2008 dalam Suharto, 2008) :

a. *Brand differentiation*

Dalam persaingan pasar yang kian kompetitif, *CSR* bisa memberikan citra perusahaan yang khas, baik, dan etis di mata publik yang pada gilirannya menciptakan *customer loyalty*. *The Body Shop* dan *BP* (dengan bendera “*Beyond Petroleum*”-nya), sering dianggap sebagai memiliki image unik terkait isu lingkungan.

b. *Human resources*

Program *CSR* dapat membantu dalam perekrutan karyawan baru, terutama yang memiliki kualifikasi tinggi. Saat *interview*, calon karyawan yang memiliki pendidikan dan pengalaman tinggi sering bertanya tentang *CSR* dan etika bisnis perusahaan, sebelum mereka memutuskan menerima tawaran. Bagi staf lama, *CSR* juga dapat meningkatkan persepsi, reputasi dan dedikasi dalam bekerja.

c. *License to operate*

Perusahaan yang menjalankan *CSR* dapat mendorong pemerintah dan publik memberi “ijin” atau “restu” bisnis. Karena dianggap telah memenuhi standar operasi dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat luas.

d. *Risk management*

Manajemen resiko merupakan isu sentral bagi setiap perusahaan. Reputasi perusahaan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap oleh skandal korupsi, kecelakaan karyawan, atau kerusakan lingkungan. Membangun budaya “*doing the right thing*” berguna bagi perusahaan dalam mengelola resiko-resiko bisnis.

10. *Corporate Governance* dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Menurut Supomo (2004) dalam Suharto (2008) *CSR* yang baik memadukan empat prinsip *good corporate governance*, yakni *fairness*, *transparency*, *accountability* dan *responsibility* secara harmonis. Ada perbedaan mendasar diantara keempat prinsip tersebut. Tiga prinsip pertama cenderung bersifat *shareholders-driven*, karena lebih memerhatikan kepentingan pemegang saham perusahaan. Sebagai contoh, *fairness* bisa berupa perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas; *transparency* menunjuk pada penyajian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu; sedangkan *accountability* diwujudkan dalam bentuk fungsi dan kewenangan RUPS, komisaris, dan direksi yang harus dipertanggungjawabkan. Sementara itu, prinsip *responsibility* lebih mencerminkan *stakeholders-driven*, karena lebih mengutamakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. *Stakeholders* perusahaan bisa mencakup karyawan beserta keluarganya, pelanggan, pemasok, komunitas setempat dan masyarakat luas, termasuk pemerintah selaku *regulator*. Di sini, perusahaan bukan saja dituntut mampu menciptakan nilai tambah (*value added*) produk dan jasa bagi *stakeholders* perusahaan, melainkan pula harus sanggup memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya itu (Supomo, 2004 dalam Suharto, 2008). Manfaat *CSR* yaitu dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dapat terwujud jika ada kerjasama peran antara *corporate governance* dengan strategi *CSR*.

Menurut Jamali *et al.* (2008) dalam Handajani, Sutrisno, dan Chandrarin (2009), mekanisme *GCG* tidak hanya dapat mengurangi *agency cost*, tetapi juga menciptakan nilai *stakeholders*. *Corporate governance* memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan dan mengawasi implementasi dari *CSR*, dan sebuah keefektifan *corporate governance* merupakan dasar berdirinya *CSR* secara keseluruhan. Perusahaan membutuhkan kekuatan *corporate governance* sebagai usaha untuk

mengawasi aspek negatif dari *CSR* bagi komunitas, seperti kebohongan yang dilakukan oleh perusahaan, kejahatan hukum dan peraturan, dan penyalahgunaan norma sosial. *CSR* sebagai fokus dari *corporate governance* akan menjadi alat untuk mengkombinasikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan di dalam proses pengambilan keputusan bisnis, yang tidak hanya berguna untuk investor, tetapi juga untuk pelanggan dan komunitas.

Anggraini (2006) dalam Nurkhin (2009) menyatakan bahwa tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin bagus (*good corporate governance*) semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. *Corporate Governance* dan Profitabilitas ; Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Nurkhin (2009) melakukan studi empiris pada perusahaan yang tercatat di BEI mengenai pengaruh *corporate governance* (diproksikan dengan kepemilikan institutional dan mekanisme struktur dewan komisaris) dan profitabilitas (diproksikan dengan *ROE*) terhadap pengungkapan *CSR*, dengan ukuran perusahaan dan tipe industri sebagai variabel kontrol. Pengungkapan tanggung jawab sosial diukur dengan proksi *CSRDI* (*corporate social responsibility disclosure index*) berdasarkan indikator *GRI* (*global reporting initiatives*). Indikator *GRI* terdiri dari 3 fokus pengungkapan, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai dasar *sustainability reporting*. Pendekatan ini pada dasarnya menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap item *CSR* dalam instrument penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan. Selanjutnya, skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor

untuk setiap perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2007 dan mengungkapkan laporan CSR dalam laporan tahunan 2007. Akhirnya, terdapat 89 sampel yang dipilih dengan metode *purposive sampling*.

Hasil penelitian menyatakan bahwa kepemilikan institusional (diproksikan dengan jumlah kepemilikan saham oleh investor institusi terhadap total jumlah saham yang beredar) tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Komposisi dewan komisaris (diproksikan dengan persentase jumlah dewan komisaris independen) dan profitabilitas (diproksikan dengan ROE) terbukti signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan ukuran perusahaan dan tipe industri sebagai variabel kontrol tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta)

Anggraini (2006) dalam Imposium Nasional Akuntansi IX yang dilaksanakan di Padang pada tanggal 23-26 Agustus 2006 meneliti tentang pengungkapan akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan dan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Sampel penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang *go public* di BEI dan perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan lengkap (termasuk catatan atas laporan keuangan) periode 2000-2004. Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh sampel sebanyak 1188 perusahaan. Pengungkapan informasi sosial diukur

berdasarkan 3 kategori *corporate sustainability reporting* : *economic performance, environment performance, and social performance* (Darwin, 2004). Faktor-faktor yang diuji pengaruhnya terhadap kebijakan perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi sosial, yaitu persentase kepemilikan manajemen, tingkat *leverage* (rasio utang/ekuitas), biaya politis (diproksikan dengan ukuran perusahaan dan tipe industri), profitabilitas (*net profit margin*).

Penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas terhadap kebijakan pengungkapan informasi sosial oleh perusahaan, hanya variabel persentase kepemilikan manajemen dan tipe industri yang berpengaruh signifikan terhadap kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan informasi sosial. Penelitian ini juga menyatakan bahwa hampir semua perusahaan sampel mengungkapkan kinerja ekonominya, yang lebih banyak berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap karyawannya, yaitu dalam bentuk pemberian uang pesangon, pensiun, dan bonus. Pengungkapan kinerja lingkungan masih sangat sedikit. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan juga belum ada aturan mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Perusahaan akan mengungkapkan informasi tertentu jika ada aturan yang menghendakinya. Sedangkan pada perusahaan perbankan dan asuransi sebagian besar (lebih dari 50%) mengungkapkan informasi mengenai pengembangan sumber daya manusianya dibandingkan dengan industri yang lain. Hal ini karena industri ini sangat tergantung pada kemampuan manusia (karyawan) dalam memberikan jasanya kepada pelanggan. Perusahaan dengan kepemilikan manajemen yang besar dan termasuk dalam industri yang memiliki risiko politis yang tinggi (*high-profile*) cenderung mengungkapkan informasi sosial yang lebih banyak dibandingkan perusahaan lain.

3. *Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance and the Intellectual Property : An External Strategy of the Management to Increase the Company's Value*

Andayani, dkk. (2008) menguji hubungan antara pengaruh *corporate governance* (diproksikan dengan kepemilikan institutional, *market capitalization*, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit) terhadap *CSR* (diproksikan dengan peringkat *CSR* yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dimana nilai 1 untuk warna emas, hijau, dan biru (untuk kategori *compliant companies*) dan nilai 0 untuk warna merah dan hitam (untuk kategori *non compliant companies*). Selain itu, menguji hubungan antara pengaruh *corporate governance* (diproksikan dengan kepemilikan institutional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit) dan *CSR* (diproksikan dengan peringkat *CSR*) terhadap kinerja perusahaan (diproksikan dengan Tobin's Q dan *ROE*) juga menguji hubungan antara pengaruh kekayaan intelektual (*intellectual property*) terhadap kinerja perusahaan.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini berdasarkan *purposive sampling*, yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di BEJ pada tahun 2004 dan 2005, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan yang sudah diaudit pada tahun 2004 dan 2005, dan perusahaan yang termasuk dalam peringkat *CSR* yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2004 dan 2005. Khusus untuk kekayaan intelektual, yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di BEJ pada tahun 2004 dan 2005, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan yang sudah diaudit pada tahun 2004 dan 2005, dan perusahaan yang memiliki kekayaan intelektual dan telah membayar beban untuk *patent right, trade mark, information technology, and brand*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara dewan komisaris independen dengan peringkat *CSR*, namun tidak terdapat hubungan

antara kepemilikan institutional, *market capitalization*, komite audit, dan kualitas audit dengan peringkat *CSR*. Selain itu, terdapat hubungan positif antara kepemilikan institutional dan peringkat *CSR* dengan kinerja perusahaan. Sedangkan untuk kekayaan intelektual (*intellectual property*) yang dimiliki oleh perusahaan terbatas, berperan penting dalam peningkatan nilai perusahaan karena investor akan mempertimbangkan kekayaan intelektual sebagai sesuatu hal yang penting dalam keputusan berinvestasi.

4. *The Effect of Earnings Management and Corporate Governance Mechanism on Corporate Social Responsibility Disclosure : An Empirical Study at Public Companies in Indonesia Stock Exchange*

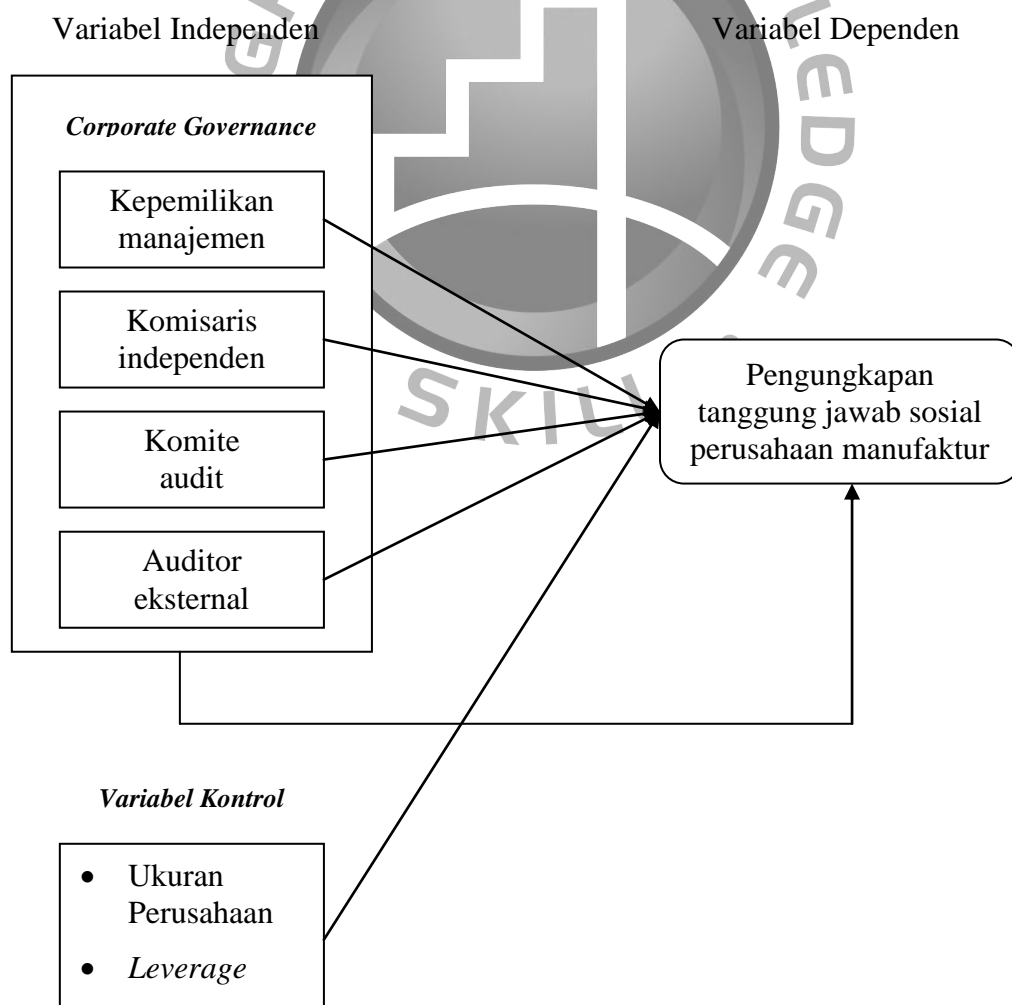
Handajani, Sutrisno, dan Grahita (2009) dalam studi empiris pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI, menguji hubungan antara *earnings management* dan mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan *CSR*. Proksi untuk *earnings management* dihitung menggunakan model Jones (1991), dimana *total accrual* terdiri dari *nondiscretionary accruals* dan *discretionary accrual* (Dechow et al., 1995). Proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institutional, dan komite audit adalah proksi yang digunakan untuk mekanisme *corporate governance*. Pengungkapan *CSR* diukur dengan *ICSR (index corporate social responsibility)* berdasarkan indikator *GRI (global reporting initiatives)*. Indikator *GRI* yang digunakan sebanyak 78 item yang terdiri dari ekonomi (9 item), lingkungan (30 item), praktik kerja (14 item), hak manusia (9 item), sosial (8 item), tanggungjawab terhadap produk (9 item). Sedangkan proksi yang digunakan untuk variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, tipe industri, dan *leverage*. Sampel yang digunakan adalah perusahaan (perusahaan publik non-keuangan) yang terdaftar di BEI dan mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaannya

pada periode 2005–2007. Akhirnya, terdapat 89 sampel yang dipilih dengan metode *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara *earnings management* dan komite audit dengan pengungkapan *CSR*. Tidak terdapat hubungan antara dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional dengan pengungkapan *CSR*.

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran



1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam penelitian ini bersifat sukarela dan dapat dilihat dari indeks pengungkapan tanggung jawab sosial sukarela perusahaan manufaktur. Pengungkapan tanggung jawab sosial sukarela perusahaan menunjukkan seberapa luas butir-butir atau *item-item* pengungkapan yang berkaitan dengan aktivitas sosial sebuah perusahaan diungkapkan di laporan tahunan perusahaan. *Item-item* pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam penelitian ini didasarkan atas penelitian Hackston & Milne (1996) yang terdiri dari enam tema, yaitu tema lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan karyawan, tenaga kerja, produk, serta keterlibatan dalam komunitas. Namun, dalam penelitian ini hanya item yang bersifat sukarela saja yang diukur indeksnya, yaitu tema lingkungan, produk, dan keterlibatan dalam komunitas, karena kategori-kategori tersebut berhubungan erat dengan pihak eksternal, sesuai dengan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih mengutamakan hubungan antara perusahaan dengan pihak eksternal. Ketiga tema tersebut lalu disesuaikan dengan regulasi tentang isu sosial di Indonesia, yaitu UU No.23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Content analysis digunakan untuk mengukur pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. *Content analysis* adalah suatu metode pengkodifikasian teks dari ciri-ciri yang sama untuk ditulis dalam berbagai (kategori) tergantung pada kriteria yang ditentukan (Weber, 1988 dalam Sembiring, 2003 dalam Sulastini, 2007). Pengukuran variabel ini dengan *check list* yaitu mengukur pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di dalam laporan tahunan yang dilakukan dengan pengamatan mengenai ada tidaknya suatu item informasi yang termasuk ke dalam tiga kategori, yaitu lingkungan,

produk, dan keterlibatan dalam komunitas. Apabila item informasi tidak ada dalam laporan CSR maka diberi skor 0, jika item informasi yang ditentukan ada dalam laporan CSR dalam bentuk kata-kata maka diberi skor 1, dan jika item informasi yang ditentukan ada dalam laporan CSR dalam bentuk gambar maka diberi skor 2.

$$IP = n / k$$

Keterangan :

IP : Indeks pengungkapan tanggung jawab perusahaan manufaktur

n : Jumlah butir pengungkapan yang dipenuhi

k : Jumlah semua butir pengungkapan yang mungkin dipenuhi

2. Variabel Independen

a. Kepemilikan manajemen

Agency problem bisa dikurangi bila manajer mempunyai kepemilikan saham dalam perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Murwaningsari, 2006). Konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil (Jensen & Meckling, 1976 dalam Angraini, 2006). Dalam hal ini manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Sebaliknya semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak *insiders*, maka *insiders* akan ikut memperoleh manfaat langsung atas keputusan – keputusan yang diambilnya, namun juga akan menanggung resiko secara langsung bila keputusan itu salah. Dengan demikian kepemilikan saham oleh *insiders* merupakan insentif untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Murwaningsari, 2006). Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan, meskipun ia harus

mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut (Gray, *et al.*, 1988 dalam Anggraini, 2006).

Jadi, kepemilikan manajemen berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kepemilikan manajemen dalam penelitian ini diukur berdasarkan besarnya persentase saham yang dimiliki manajemen di dalam struktur perusahaan.

b. Komisaris independen

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan) yang dipilih secara transparan dan independen, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain, serta dapat bertindak secara objektif dan independen dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *good corporate governance* (Alijoyo, 2004).

Tipe anggota dewan komisaris menjadi dua, yaitu : *outside* dan *inside directors* (Kosnik, 1987 dalam Arifin, 2002 dalam Sulastini, 2007). Penelitian berkaitan dewan komisaris di Indonesia yang dilakukan Arifin (2002), Dia menemukan bahwa komposisi dewan komisaris yang diukur dengan rasio *outside directors* terhadap jumlah dewan komisaris mempunyai pengaruh yang signifikan (positif) terhadap pengungkapan sukarela (Sembiring, 2003 dalam Sulastini, 2007). Dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dipandang lebih baik, karena pihak dari luar akan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan dengan lebih objektif dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki susunan dewan komisaris yang hanya berasal dari dalam perusahaan.

BEI telah mewajibkan adanya komisaris independen di dalam kepengurusan emiten untuk mewakili pemegang saham minoritas tersebut. BEI telah mengatur tentang

rasio komisaris independen yaitu komisaris independen jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh yang bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota komisaris.

Keberadaan dewan komisaris independen dapat memberikan kontrol dan *monitoring* bagi manajemen dalam operasional perusahaan, termasuk dalam pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Keberadaan dewan komisaris independen di Indonesia yang diatur dengan Ketentuan Bapepam dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A tanggal 14 Juli tahun 2004 mampu memberikan monitor yang positif yaitu dalam mengawasi kegiatan manajemen dalam pengungkapan *CSR*. Dewan komisaris independen memberikan tekanan kepada manajemen untuk melaksanakan aktivitas *CSR* dengan baik. Dengan demikian proporsi dewan komisaris independen akan berdampak pada meningkatnya kegiatan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi, proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Proksi yang digunakan adalah proporsi komisaris independen dalam struktur dewan komisaris. Proporsi dewan komisaris independen dihitung dengan cara membagi jumlah dewan komisaris independen dengan total anggota dewan komisaris yang ada diperusahaan.

c. Komite audit

Komite audit diangkat dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Seluruh anggota komite terdiri atas pihak luar yang independen, dan jabatan ketua dipegang oleh komisaris independen. Direksi, internal auditor, eksternal auditor dan pihak tertentu wajib hadir dalam rapat komite jika diminta. Tugas komite audit adalah memastikan bahwa kegiatan audit, baik audit internal dan audit eksternal, sudah

dijalankan sebagaimana mestinya. Komite juga melakukan fungsi kontrol dan membantu dewan komisaris menjalankan tanggung jawab pengawasannya. Dalam melaksanakan tugas, komite audit membutuhkan informasi yang disediakan oleh direksi, auditor internal, auditor eksternal dan komite lain. Jumlah komite audit yg telah ditetapkan oleh Bapepam adalah sebanyak tiga orang.

Fungsi independensi dalam mengaudit dilibatkan dalam aktivitas perusahaan sehingga dapat mempengaruhi akuntabilitas dan implementasi dari strategi *CSR* (Rodgers *et al.*, 2007 dalam Handajani, Sutrisno, dan Chandrarin, 2009). Ho dan Wong (2001) dalam Handajani, Sutrisno, dan Chandrarin (2009) menemukan bukti empirik bahwa terdapat hubungan positif antara pengungkapan sukarela perusahaan dengan keberadaan komite audit pada perusahaan. Kurihama (2007) dalam Handajani, Sutrisno, dan Chandrarin (2009) berpendapat bahwa sebuah sistem audit adalah sebuah integrasi dan sistem elemen untuk membangun sebuah sistem *corporate governance* yang diatur untuk menjamin operasi *CSR*. Komite audit juga menjadi sebuah mekanisme kontrol yang dapat meningkatkan kualitas arus informasi antara *shareholders* dan manajer, terutama dalam menyiapkan laporan keuangan lingkungan, dimana keduanya memiliki perbedaan nilai informasi (Barako *et al.*, 2006 dalam Handajani, Sutrisno, dan Chandrarin, 2009). Sebagai bagian dari kesatuan *corporate governanve*, komite audit diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam mengimplementasikan dan menginformasikan pengungkapan *CSR* di dalam laporan tahunan perusahaan. Jadi, jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Bapepam, dimana jumlah komite audit yang dianjurkan yaitu sebanyak tiga orang, maka *proxy* yang digunakan berupa variabel *dummy*. Perusahaan yang memiliki jumlah komite audit lebih

dari tiga orang diberi nilai 1, sedangkan untuk perusahaan yang memiliki komite audit yang jumlahnya tiga atau kurang dari tiga orang diberi nilai 0. Hal ini didasarkan atas semakin banyak komite audit yang dimiliki suatu perusahaan, maka mekanisme kontrolnya lebih baik, sehingga akuntabilitas dan transparansi dalam mengimplementasikan dan menginformasikan pengungkapan *CSR* di dalam laporan tahunan perusahaan pun semakin baik.

d. Auditor eksternal

Auditor eksternal adalah auditor yang ditunjuk oleh perusahaan untuk melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan. Auditor eksternal bertanggung jawab memberikan opini/pendapat terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan yang disajikan manajemen perusahaan. Auditor eksternal dapat menjadi mekanisme pengendalian terhadap manajemen karena bersifat independen terhadap perusahaan. Laporan audit yang dikeluarkan oleh auditor eksternal dituntut untuk memiliki kualitas yang tinggi karena akan mempengaruhi tingkat kepercayaan pengguna laporan tersebut.

IAI dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA No.4 tahun 1994) (Nuryaman, 2009) menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang cukup memiliki keahlian dan pelatihan teknis sebagai auditor. Dari penjelasan tersebut, nampak bahwa agar akuntan eksternal berperan optimal, maka harus memberikan jasa audit berkualitas. Kualitas audit dapat dipenuhi jika audit dapat dilakukan oleh auditor kompeten dan independen.

Menurut Barnea and Rubin (2005), kualitas audit dari auditor eksternal mempengaruhi rating *CSR*. Jika kualitas audit dari auditor eksternal baik, maka akan dapat meningkatkan rating *CSR*. Argumen ini didasarkan pada manajemen yang baik dalam sebuah perusahaan dapat meningkatkan rating *CSR*. Jadi, dapat kita simpulkan

bahwa auditor eksternal berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Untuk membuktikan hal tersebut, maka digunakan *proxy* ukuran KAP. Kategori yang pertama adalah auditor yang masuk dalam *big four auditors*, yaitu Pricewaterhouse Coopers yang mempunyai afiliasi di Indonesia dengan KAP Haryanto Sahari dan Rekan, Deloitte yang mempunyai afiliasi di Indonesia dengan KAP Osman Bing Satrio, Ernest & Young yang mempunyai afiliasi di Indonesia dengan KAP Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja, dan KPMG yang mempunyai afiliasi di Indonesia dengan KAP Sidharta dan Widjaja. Di Indonesia, kategori KAP yang masuk dalam *big four auditors* adalah KAP yang telah berafiliasi internasional dengan ke empat auditor besar yang telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan kategori kedua adalah auditor yang tidak termasuk dalam *big four*.

Selanjutnya untuk mengukur variabel ini maka akan digunakan variabel *dummy*. Penetapannya adalah nilai 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berafiliasi internasional dengan KAP *big four*, sedangkan nilai 0 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP *non big four*. Hal ini didasarkan atas KAP *big four* memiliki kualitas audit yang lebih baik daripada KAP *non big four*, sehingga KAP *big four* akan memberikan jasa audit yang lebih berkualitas. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four*, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaannya akan lebih baik daripada perusahaan yang diaudit oleh KAP *non big four*.

3. Variabel Kontrol

a. Ukuran perusahaan (*Size*)

Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki *public demand* akan informasi yang lebih tinggi dan menjadi sorotan banyak pihak, baik dari

masyarakat maupun pemerintah sehingga mereka berupaya menyajikan pengungkapan yang lebih baik dibanding perusahaan kecil. Selain itu, menurut Hasibuan (2001) dalam Sulastini (2007), perusahaan besar akan menghadapi resiko politis yang lebih besar dibanding perusahaan kecil. Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan sosial yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis bagi perusahaan. Alasan lain adalah perusahaan besar dan memiliki biaya keagenan yang lebih besar tentu akan mengungkapkan informasi yang lebih luas hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya keagenan yang dikeluarkan. Lebih banyak pemegang saham, berarti memerlukan lebih banyak juga pengungkapan, hal ini dikarenakan tuntutan dari para pemegang saham dan para analis pasar modal (Gunawan, 2000 dalam Sulastini, 2007). Menurut Buzby dalam Hasibuan (2001) dalam Sulastini (2007) ada dugaan bahwa perusahaan yang kecil akan mengungkapkan lebih rendah kualitasnya dibanding perusahaan besar, karena ketiadaan sumber daya dan dana yang cukup besar dalam laporan tahunan. Manajemen khawatir dengan mengungkapkan lebih banyak akan membahayakan posisi perusahaan terhadap kompetitor lain. Jadi, secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi mengenai lebih banyak daripada perusahaan kecil. Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan log natural dari total aktiva perusahaan.

$$\text{Size} = \text{Log Natural (Total Aktiva)}$$

b. *Leverage*

Rasio *leverage* menunjukkan seberapa besar aset perusahaan diperoleh atau didanai oleh utang. Menurut Amalia (2005), perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi mempunyai kewajiban lebih untuk memenuhi kebutuhan informasi krediturnya.

Pemberian informasi yang lebih banyak ini bertujuan untuk memudahkan perolehan tambahan dana dengan biaya murah baik dari perolehan hutang maupun dari penerbitan saham, untuk program pendanaan berikutnya. *Leverage* diukur dengan membagi total hutang perusahaan dengan total aset perusahaan.

D. Hipotesis

- H_0 : Kepemilikan manajemen tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008.
- H_1 : Kepemilikan manajemen berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008.
- H_0 : Komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008.
- H_2 : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008.
- H_0 : Komite audit tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008.
- H_3 : Komite audit berpengaruh positif pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008.
- H_0 : Auditor eksternal tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008.
- H_4 : Auditor eksternal berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008.

H_0 : Kepemilikan manajemen, komisaris independen, komite audit, dan auditor eksternal tidak berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008.

H_5 : Kepemilikan manajemen, komisaris independen, komite audit, dan auditor eksternal berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008.

E. Spesifikasi Model

$$\text{INDEKS}_i = \alpha_0 + \alpha_1 \text{KPM}_i + \alpha_2 \text{BOC}_i + \alpha_3 \text{AUDCOM}_i + \alpha_4 \text{AUDIT}_i + \alpha_5 \text{SIZE}_i + \alpha_6 \text{LEV}_i + \varepsilon_i$$

INDEKS : Indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur

KPM : Kepemilikan manajemen

BOC : Komisaris independen

AUDCOM : Komite audit

AUDIT : Auditor eksternal

SIZE : Ukuran perusahaan

LEV : *Leverage*

ε : *Error term*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang termasuk industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 seperti yang tercantum dalam *Indonesia Capital Market Directory* yang meliputi kelompok saham industri dasar dan kimia, aneka industri, dan industri barang konsumsi dan telah memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel. Alasan dipilihnya satu kelompok industri yaitu industri manufaktur sebagai objek penelitian karena industri manufaktur adalah industri yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, sehingga berpeluang dalam menimbulkan masalah-masalah sosial seperti polusi, limbah, dan keamanan produk. Hal ini disebabkan karena dalam proses produksinya perusahaan manufaktur mau tidak mau akan menghasilkan limbah produksi dan hal ini berhubungan erat dengan masalah pencemaran lingkungan. Selain itu, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang menjual produk kepada konsumen sehingga isu keselamatan dan keamanan produk menjadi penting untuk diungkapkan kepada masyarakat. Hal-hal inilah yang membedakan perusahaan manufaktur dari perusahaan-perusahaan lainnya.

B. Metode Pengumpulan Data

1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 seperti yang tercantum dalam *Indonesia Capital Market Directory* yang meliputi kelompok saham industri dasar dan kimia, aneka industri, dan industri barang konsumsi dan telah memenuhi kriteria untuk

dijadikan sampel. Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *judgement sampling*, yaitu salah satu bentuk *purposive sampling* dengan mengambil sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan maksud dan tujuan penelitian.

2. Data

Penelitian ini menggunakan data *crosssection* (satu tahun) yaitu tahun 2008. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data diperoleh secara tidak langsung melalui pihak ketiga, yakni media perantara Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) BEI. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur yang didapat melalui Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) BEI.

C. Metode Analisis Data

1. Analisis Regresi

Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti mengubah data mentah tersebut menjadi proksi-proksi yang telah ditentukan. Setelah nilai proksi dari setiap variabel telah didapat, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan model regresi *linear* berganda menggunakan program SPSS 16.0. Penelitian ini akan diuji menggunakan metode regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Di dalam model regresi, bukan hanya variabel independen saja yang mempengaruhi variabel dependen, melainkan masih ada faktor lain yang dapat menyebabkan kesalahan dalam observasi, yaitu yang disebut kesalahan pengganggu (ϵ) atau *disturbance's error* (Supranto, 2001 dalam Sri Sulastini, 2007). Metode regresi berganda akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan *Best Linear Unbiased Estimation (BLUE)*.

2. Uji Asumsi Klasik

Agar model analisis regresi yang dipakai dalam penelitian ini secara teoretis menghasilkan nilai parametrik yang sah terlebih dahulu akan dilakukan pengujian asumsi klasik regresi. Hal ini untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias mengingat tidak pada semua data dapat diterapkan regresi. Pengujian yang dilakukan adalah uji Normalitas, uji Multikolinieritas, dan uji Heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam metode regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2009). Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak menggunakan dua cara yaitu melalui analisis grafik dan analisis statistik.

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas terjadi jika ada hubungan linear yang sempurna atau hampir sempurna antara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Ghozali, 2009). Untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilakukan dengan menganalisis korelasi antar variabel dan perhitungan nilai *tolerance* serta *variance inflation factor (VIF)*. Multikolinieritas terjadi jika nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95% . Dan nilai *VIF* lebih besar dari 10, apabila *VIF* kurang dari 10 dapat dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model adalah dapat dipercaya dan objektif (Gujarati, 2003 dalam Sulastini, 2007).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009).

Apabila hasil pengolahan data yaitu tingkat probabilitas signifikansi variabel independen $< 0,05$ maka dapat dikatakan mengandung heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas diukur dengan metode plot, jika scatterplot menunjukkan adanya titik-titik yang membentuk pola tertentu maka terjadi heteroskedastisitas. Akan tetapi, bila menyebar di atas dan di bawah sumbu y , serta tidak membentuk pola maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk lebih menjamin keakuratan hasil maka dilakukann uji statistik dengan menggunakan uji Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2009). Jika dari hasil uji Glejser didapat bahwa tidak ada satu pun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel depeden nilai absolut U_t (Abs U_t) dan probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% maka dapat diambil kesimpulan model regresi tersebut tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas

dari suatu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin–Watson (Ghozali, 2009).

3. Teknik Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan metode uji signifikansi parameter individual (uji statistik t), uji signifikansi simultan (uji statistik F), uji koefisien determinasi (R^2).

a. Uji koefisien determinasi (R^2)

Pengujian R^2 dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan variabel-variabel bebas (*independent variable*) untuk menjelaskan variabel terikat (*dependent variable*) dalam suatu persamaan regresi. R^2 mengandung kelemahan mendasar di mana adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Oleh karena itu, pada penelitian ini yang digunakan *adjusted* R^2 berkisar antar nol dan satu. Jika nilai *adjusted* R^2 makin mendekati satu maka makin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen, sedangkan nilai R^2 yang mendekati nol berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas.

b. Uji signifikansi simultan (Uji statistik F)

Menurut Ghozali (2009) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan

significance level 0,05 ($\alpha=5\%$). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Jika P value $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan kelima variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika P value $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara simultan kelima variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji signifikansi parameter individual—one tail (Uji statistik t)

Menurut Ghozali (2009) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$).

Dasar penerimaan atau penolakan hipotesis untuk masing–masing variabel sebagai berikut :

- H_1 : Kepemilikan manajemen berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008.
- H_2 : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008.
- H_3 : Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008.
- H_4 : Auditor eksternal berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008.
- H_5 : Kepemilikan manajemen, komisaris komisaris independen, komite audit, dan auditor eksternal secara simultan berpengaruh positif terhadap terhadap

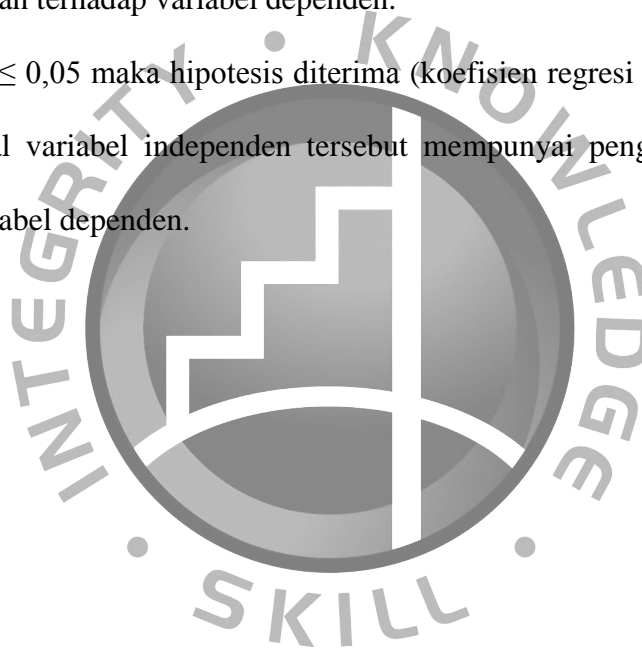
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008.

$$H_0 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 \leq 0$$

$$H_1 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 > 0$$

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika P value $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika P value $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.



BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Pada bab ini akan disajikan hasil dari analisis data berdasarkan pengamatan sejumlah variabel yang digunakan dalam model analisis regresi berganda untuk mengetahui apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2008. Alasan dipilihnya satu kelompok industri yaitu industri manufaktur sebagai objek penelitian karena industri manufaktur adalah industri yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, sehingga berpeluang dalam menimbulkan masalah-masalah sosial seperti polusi, limbah, dan keamanan produk. Hal ini disebabkan karena dalam proses produksinya perusahaan manufaktur mau tidak mau akan menghasilkan limbah produksi dan hal ini berhubungan erat dengan masalah pencemaran lingkungan. Selain itu, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang menjual produk kepada konsumen sehingga isu keselamatan dan keamanan produk menjadi penting untuk diungkapkan kepada masyarakat. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *judgement sampling*, yaitu salah satu bentuk *purposive sampling* dengan mengambil sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan maksud dan tujuan penelitian.

Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian sampel :

1. Perusahaan manufaktur yang meliputi kelompok saham industri dasar dan kimia, aneka industri, dan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI dan sahamnya aktif diperdagangkan pada tahun 2008.

2. Perusahaan manufaktur tersebut menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) pada tahun 2008 dan mengungkapkan informasi tanggung jawab sosialnya pada laporan tahunan perusahaan pada tahun 2008.
3. Perusahaan manufaktur yang laporan tahunannya (*annual report*) tahun 2008 dapat diakses di Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) BEI.

Perusahaan manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 84 perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian disajikan dalam lampiran 1.

Tabel 4.1
Pemilihan Sampel

Total perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008	138
Perusahaan dengan laporan tahunan yang tidak lengkap	(54)
Total perusahaan pada sampel	84

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Statistik Deskriptif

Pada bagian ini akan digambarkan atau dideskripsikan dari data masing-masing variabel yang telah diolah dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan skewness dari masing-masing variabel.

Tabel 4.2
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
INDEKS	84	0.00	0.87	0.3554
KPM	84	0.0000	0.7000	0.027197
BOC	84	0.25	1.00	0.418
SIZE	84	24.48	32.02	27.8592
LEV	84	0.09	2.88	0.6128
Valid N (listwise)	84			

AUDCOM					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	77	91.7	91.7	91.7
	1	7	8.3	8.3	100
	Total	84	100	100	

AUDIT					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	44	52.4	52.4	52.4
	1	40	47.6	47.6	100
	Total	84	100	100	

Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui *statistik deskriptif* dari masing - masing variabel. nya. Nilai minimum indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur terkecil adalah 0,00 yang dilakukan oleh PT Mayora Indah Tbk dan Nilai maksimum indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur terbesar adalah 0,87 yang dilakukan oleh PT Holcim Indonesia Tbk. Rata-rata indeks pengungkapan tanggung jawab sosial dari 84 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008 adalah 0,3554 atau 35,54%.

Besar persentase kepemilikan manajemen terkecil adalah 0% yang dimiliki oleh hampir sebagian besar sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008 dan persentase kepemilikan manajemen terbesar adalah 70% yang dimiliki oleh PT Sat

Nusapersada Tbk. Sedangkan rata - rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008 memiliki persentase kepemilikan manajemen hanya sebesar 2,7197% dari keseluruhan jumlah saham yang beredar.

Proporsi komisaris independen (*Board of Commisioner*) terkecil adalah 0,25 dan terbesar adalah 1. Dilihat dari nilai rata – ratanya, sebanyak 41,80% rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2008 telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yaitu untuk memiliki jumlah komisaris independen minimal 30% dari total dewan komisaris yang ada didalam perusahaan.

Nilai minimum untuk variabel kontrol ukuran perusahaan yaitu 24,48 (total asset Rp 42.808.392.211) dan nilai maksimumnya yaitu 32,02 (total asset Rp 80.558.117.790.851). Nilai rata-rata natural logaritma dari jumlah total aset perusahaan sebesar 27,8592. Jika di-anti LN kan, berarti bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008 memiliki total aset sebesar Rp 1.256.310.039.188.

Nilai minimum untuk variabel kontrol *leverage* sebesar 0,09 dan nilai maksimumnya sebesar 2,88. Sedangkan rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2008 melakukan pembiayaan dengan menggunakan hutang (*debt*) sebesar 61,28% dari total asetnya.

Variabel bebas komite audit (*AUDCOM*) menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008 yang memiliki anggota komite audit lebih dari 3 orang hanya sebesar 8,3% saja, sedangkan 91,7% lainnya membentuk anggota komite audit sesuai dengan ketentuan minimal BAPEPAM.

Sedangkan variabel auditor eksternal (*AUDIT*) menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008 yang menggunakan jasa auditor eksternal yang tergabung dalam kelompok *Big Four Auditors* sebesar 52,4% dan 47,6%

perusahaan manufaktur lain menggunakan jasa auditor eksternal non *Big Four*. Jadi pada tahun 2008, lebih banyak perusahaan yang menggunakan jasa auditor eksternal yang berafiliasi dalam KAP *Big Four* dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan jasa auditor non *Big Four*.

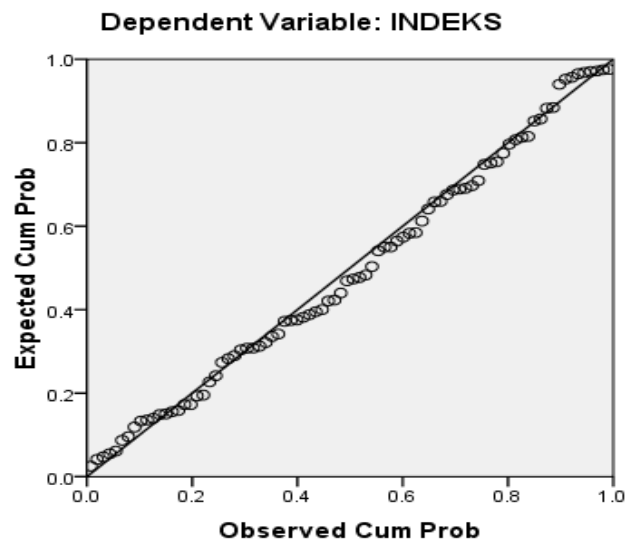
2. Uji Asumsi Klasik

Agar model analisis regresi yang dipakai dalam penelitian ini secara teoritis menghasilkan nilai parametrik yang sah terlebih dahulu akan dilakukan pengujian asumsi klasik regresi. Hal ini untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias mengingat tidak pada semua data dapat diterapkan regresi. Pengujian yang dilakukan adalah uji Normalitas, uji Multikolinieritas, dan uji Heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

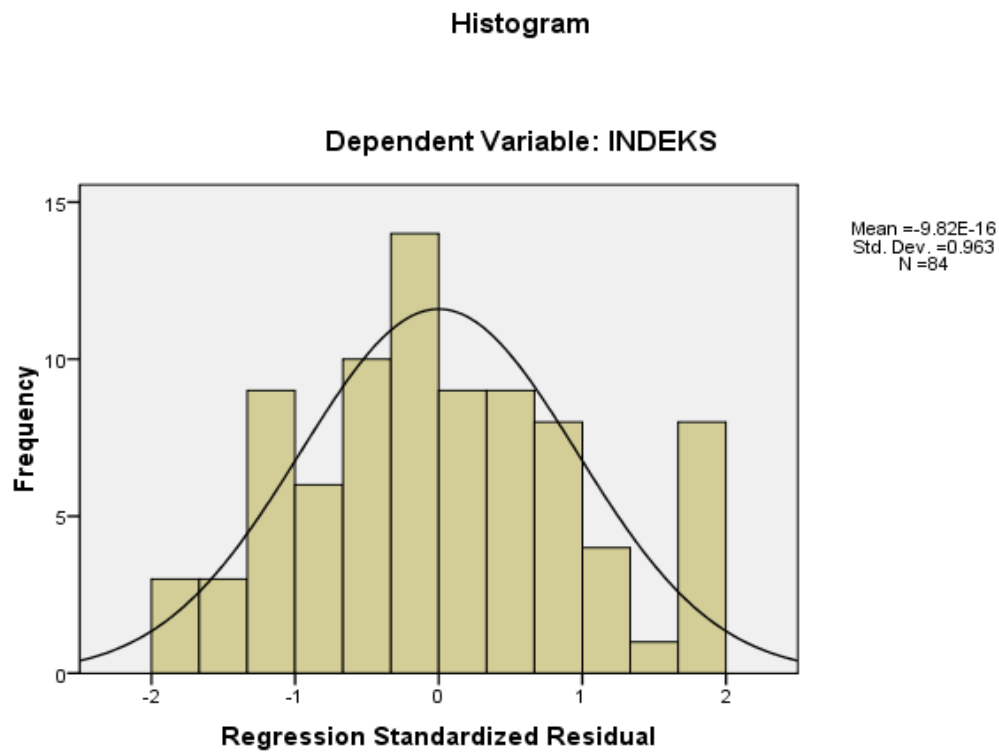
Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam metode regresi, variable terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2009). Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak menggunakan analisis grafik *normal probably plot of standardized residual* dan analisis statistik tabel *Kolmogorov-Smirnov test* atas *unstandardized residual*.

Gambar 4.1

*Normal Probably Plot of Standarized Residual***Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**

Berdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penyebaran data mendekati normal atau memenuhi asumsi normalitas. Hal tersebut juga didukung oleh gambar grafik histogram pada gambar 4.2.

Gambar 4.2
Histogram



Tabel 4.3
Tabel Kolmogorov - Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0.514
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.954

Uji *Kolmogorov-Smirnov* dilakukan dengan membuat hipotesis :

H_0 : Data residual terdistribusi normal

H_1 : Data residual tidak terdistribusi normal

Berdasarkan tabel 4.2, besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,514 dan tidak signifikan pada 0,954. Hal ini berarti H_0 diterima yang berarti data residual terdistribusi normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini adalah terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilakukan dengan menganalisis korelasi antar variabel dan perhitungan nilai *tolerance* serta *variance inflation factor (VIF)*. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan *VIF* ≥ 10 (Ghozali, 2009).

Tabel 4.4
Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	KPM	0.863	1.159
	BOC	0.946	1.057
	AUDCOM	0.941	1.062
	AUDIT	0.802	1.247
	SIZE	0.862	1.160
	LEV	0.923	1.084

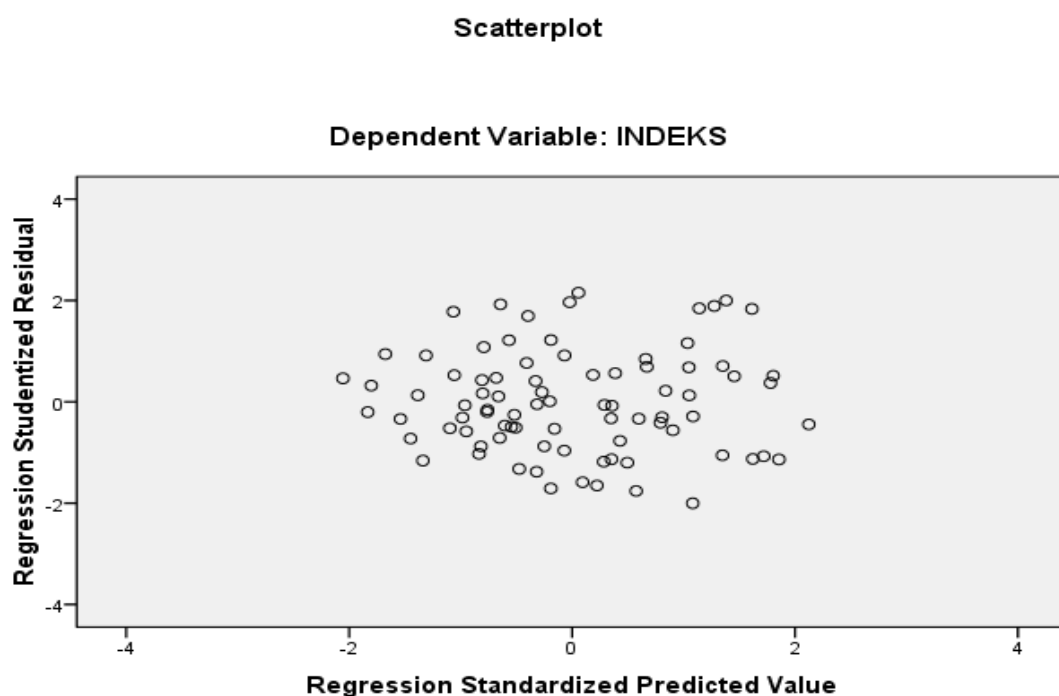
Variabel kepemilikan manajemen (KPM) memiliki nilai VIF sebesar 1,159, variabel komisaris independen (*BOC*) memiliki nilai VIF sebesar 1,057, variabel komite audit (*AUDCOM*) memiliki nilai VIF sebesar 1,062, variabel auditor eksternal (*AUDIT*)

memiliki nilai VIF sebesar 1,247, variabel ukuran perusahaan (*SIZE*) memiliki nilai VIF sebesar 1,160 dan variabel *leverage* (*LEV*) memiliki nilai VIF sebesar 1,084. Dengan demikian, hasil analisis data variabel independen menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan linier atau korelasi antar variabel bebas. Nilai VIF yang kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* semua variabel yang menunjukkan nilai lebih besar dari 0,10 menunjukkan bahwa korelasi antar variabel independen masih dapat ditolerir.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009).

Gambar 4.3
Scatterplot



Dengan melihat gambar 4.3, dapat dilihat bahwa tidak terdapat pola yang jelas, serta menghasilkan titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

Analisis dengan scatterplot seperti di atas memiliki kelemahan yang cukup signifikan, karena jumlah pengamatan yang mempengaruhi hasil plotting. Semakin sedikit jumlah pengamatan, maka semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik plot. Untuk lebih menjamin keakuratan hasil maka dilakukan uji statistik dengan menggunakan uji Glejser. Uji Glesjer dilakukan dengan cara meregres nilai absolut dari residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003 dalam Sri Sulastini, 2007).

Table 4.5
Uji Glesjer

Model	Sig.
1 (Constant)	0.489
KPM	0.285
BOC	0.108
AUDCOM	0.764
AUDIT	0.133
SIZE	0.157
LEV	0.211

Dari hasil uji Glejser didapat bahwa tidak ada satu pun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel depeden nilai absolut Ut (AbsUt) dan probabilitas signifikansinya di tingkat kepercayaan 95% maka dapat diambil kesimpulan model regresi tersebut tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Table 4.6
Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.399 ^a	0.159	0.094	0.20291	2.008
a. Predictors: (Constant), LEV, SIZE, BOC, AUDCOM, KPM, AUDIT					
b. Dependent Variable: INDEKS					

Berdasarkan table 4.6, hasil perhitungan nilai DW adalah sebesar 2,008. Nilai batas bawah (dl) dan batas atas (du) untuk $n = 84$ dengan $k = 6$ variabel adalah $dl = 1,4692$ dan $du = 1,8008$. Kriteria yang digunakan (tidak ada autokorelasi) adalah $du < d < 4 - du$. Dengan demikian nilai DW terletak antara du (1,8008) dengan $4 - du$ (2,1992). Hal ini berarti bahwa dalam model tidak terdapat autokorelasi.

3. Persamaan Regresi

Dalam penelitian ini dilakukan analisis regresi untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi yang digunakan adalah :

$$\text{INDEKS}_i = \alpha_0 + \alpha_1 \text{KPM}_i + \alpha_2 \text{BOC}_i + \alpha_3 \text{AUDCOM}_i + \alpha_4 \text{AUDIT}_i + \alpha_5 \text{SIZE}_i + \alpha_6 \text{LEV}_i + \varepsilon_i$$

Dari analisis regresi dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut :

Table 4.7
Hasil Analisis Regresi

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	-0.625	0.456
	KPM	0.030	0.268
	BOC	0.049	0.153
	AUDCOM	-0.072	0.083
	AUDIT	0.101	0.050
	SIZE	0.034	0.016
	LEV	-0.049	0.052

Dari hasil pengujian di atas maka dapat disusun suatu persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$\text{INDEKS}_i = -0,625 + 0,03 \text{ KPM}_i + 0,049 \text{ BOC}_i - 0,072 \text{ AUDCOM}_i + 0,101 \text{ AUDIT}_i + 0,034 \text{ SIZE}_i - 0,049 \text{ LEV}_i + \varepsilon_i$$

Berdasarkan persamaan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Koefisien konstanta yang didapat dari hasil regresi adalah -0,625. Hal ini dapat diartikan bahwa indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur (INDEKS) akan bernilai -0,625. Jika variabel utama KPM, BOC, AUDCOM, dan AUDIT serta variabel kontrol SIZE dan LEV masing-masing bernilai 0.
- Koefisien regresi untuk kepemilikan manajemen (KPM) yaitu 0,03. Berarti, setiap penambahan satu lembar saham yang dimiliki manajemen di dalam struktur perusahaan, maka akan meningkatkan pula indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebesar 0,03, dengan asumsi bahwa faktor lain dianggap konstan.
- Koefisien regresi untuk komisaris independen (BOC) sebesar 0,049. Berarti, setiap penambahan satu orang anggota komisaris independen, akan meningkatkan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebesar 0,049, dengan asumsi bahwa faktor lain dianggap konstan.

- d. Koefisien regresi untuk komite audit (*AUDCOM*) yaitu $-0,072$. Berarti, perusahaan manufaktur yang memiliki komite audit lebih dari tiga orang, maka indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaannya akan turun sebesar $0,072$, dengan asumsi bahwa faktor lain dianggap konstan.
- e. Koefisien regresi untuk auditor eksternal (*AUDIT*) yaitu $0,101$. Berarti, perusahaan manufaktur yang diaudit oleh auditor eksternal yang berafiliasi secara internasional dalam *KAP Big Four*, maka indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaannya akan meningkat sebesar $0,101$, dengan asumsi bahwa faktor lain dianggap konstan.
- f. Koefisien regresi untuk variable kontrol ukuran perusahaan (*SIZE*) yaitu $0,034$. Angka tersebut masih didalam bentuk natural logaritma sehingga harus dikembalikan ke dalam angka yang sebenarnya yaitu dengan cara anti LN yang menghasilkan koefisien *SIZE* sebesar $1,035$. Berarti setiap penambahan Rp1 total aset pada perusahaan manufaktur akan meningkatkan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebesar $1,035$, dengan asumsi bahwa faktor lain dianggap konstan.
- g. Koefisien regresi untuk variable kontrol *leverage* (*LEV*) yaitu $-0,049$. Berarti, setiap kenaikan satu persen *leverage*, maka akan mengurangi indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebesar $4,9\%$, dengan asumsi bahwa faktor lain dianggap konstan.

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel-variabel bebas (independen) dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel terikatnya (dependen).

Tabel 4.8
Adjusted R Square

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.399 ^a	0.159	0.094	0.20291

Nilai R^2 (*Adjusted R Square*) pada tabel 4.5 menunjukkan nilai 0,094, hal ini berarti 9,4% pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008 dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen utama yaitu kepemilikan manajemen (KPM), komisaris independen (BOC), komite audit (AUDCOM), dan auditor eksternal (AUDIT) juga variabel kontrolnya yaitu ukuran perusahaan (SIZE) dan *leverage* (LEV). Sedangkan sisanya sebesar 90,6% disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti kepemilikan institutional, struktur kepemilikan, ukuran dewan komisaris, dan profitabilitas. Tingkat *Adjusted R²* yang rendah ini menunjukkan perlunya dilakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan variabel lain sebagai penduga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005).

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji stastistik F)

Uji signifikansi simultan (Uji stastistik F) dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya (Ghozali, 2009). Uji statistik ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada hasil pengolahan ANOVA (*Analisis of Variance*). Jika nilai signifikansi $F \leq 0,05$, maka hipotesis alternatif tidak dapat ditolak atau dengan kata lain variabel independen secara statistik mempengaruhi variabel dependen secara bersama sama.

Table 4.9
ANOVA

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0.6	6	0.1	2.431	.033 ^a
	Residual	3.17	77	0.041		
	Total	3.771	83			

Berdasarkan tabel 4.6, nilai signifikansi F yaitu 0,033 (lebih kecil dari 0,05), maka hipotesis alternatif diterima atau dengan kata lain, variabel independen secara statistik mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.

Selain itu, pengujian ini juga dapat dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan SPSS menunjukkan F_{hitung} sebesar 2,431 dengan signifikansi sebesar 0,033. Harga F_{tabel} dengan dk (derajat kebebasan) pembilang 6 dan dk penyebut 83 = 5 % adalah 2,21. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $2,431 > 2,21$ dan taraf signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menunjukkan adanya pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen dapat diterima.

c. Uji Signifikansi Parameter Individual – One Tail (Uji statistik t)

Menurut Ghozali (2009) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Jika probabilita *t-stat* mempunyai nilai $\leq 0,05$ maka suatu variabel bebas dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya. Uji t-statistik dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} taraf signifikansi 5 %. Harga t_{tabel} dengan $df = 83$ adalah 1.66. Hasil pengujian menunjukkan sebagai berikut :

Tabel 4.10
Uji t

Model	t	Sig.
1 (Constant)	-1.373	0.174
KPM	0.113	0.910
BOC	0.319	0.751
AUDCOM	-0.867	0.389
AUDIT	2.046	0.044
SIZE	2.083	0.041
LEV	-0.945	0.348

Variabel kepemilikan manajemen (KPM) memiliki t_{hitung} sebesar 0,113 dan berada dalam taraf signifikansi 0,910 (di atas taraf signifikansi 0,05). Dengan demikian tampak bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan karena nilai t dinyatakan dalam tanda positif maka ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen (KPM) berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur (INDEKS) yang terdaftar di BEI tahun 2008.

Variabel komisaris independen (BOC) memiliki t_{hitung} sebesar 0,319 dan berada dalam taraf signifikansi 0,751 (di atas taraf signifikansi 0,05). Dengan demikian tampak bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan karena nilai t dinyatakan dalam tanda positif maka ini menunjukkan bahwa komisaris independen (BOC) berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur (INDEKS) yang terdaftar di BEI tahun 2008.

Variabel komite audit (AUDCOM) memiliki t_{hitung} sebesar -0,867 dan berada dalam taraf signifikansi 0,389 (di atas taraf signifikansi 0,05). Dengan demikian tampak bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan karena nilai t dinyatakan dalam tanda negatif maka ini menunjukkan bahwa komite audit (AUDCOM) berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur (INDEKS) yang terdaftar di BEI tahun 2008.

Variabel auditor eksternal (AUDIT) memiliki t_{hitung} sebesar 2,046 dan berada dalam taraf signifikansi 0,044 (di bawah taraf signifikansi 0,05). Dengan demikian tampak bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan karena nilai t dinyatakan dalam tanda positif maka ini menunjukkan bahwa auditor eksternal (AUDIT) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur (INDEKS) yang terdaftar di BEI tahun 2008.

Variabel ukuran perusahaan (*SIZE*) memiliki t_{hitung} sebesar 2,083 dan berada dalam taraf signifikansi 0,04 (di bawah taraf signifikansi 0,05). Dengan demikian tampak bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan karena nilai t dinyatakan dalam tanda positif maka ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (*SIZE*) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur (INDEKS) yang terdaftar di BEI tahun 2008.

Variabel *leverage* (*LEV*) memiliki t_{hitung} sebesar -0,945 dan berada dalam taraf signifikansi 0,348 (di atas taraf signifikansi 0,05). Dengan demikian tampak bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan karena nilai t dinyatakan dalam tanda negatif maka ini menunjukkan bahwa *leverage* (*LEV*) berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur (INDEKS) yang terdaftar di BEI tahun 2008.

5. Pembahasan

Tingkat signifikansi kepemilikan manajemen (KPM) yaitu 0,910, lebih besar dari *significance level* 0,05. Jadi, hipotesis H_1 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh kepemilikan manajemen terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur (INDEKS) yang terdaftar di BEI tahun 2008 adalah positif dan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah persentase saham

yang dimiliki oleh manajemen di dalam suatu perusahaan, tidak terbukti dapat meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini disebabkan karena kecilnya persentase kepemilikan manajemen perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008. Penelitian ini memberikan hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Barnea dan Rubin (2005) yang tidak menemukan adanya hubungan antara kepemilikan manajerial dan CSR, karena kecilnya kepemilikan saham manajemen secara individual, sehingga tidak berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Barnea dan Rubin (2005) menyatakan bahwa jika kepemilikan *insider* terletak pada tingkat yang rendah ($\leq 25\%$), maka tidak ada pengaruh antara kepemilikan *insider* dengan CSR. Sebaliknya jika kepemilikan *insider* terletak pada tingkat di atas 25%, maka pengaruh antara kepemilikan *insider* dengan CSR adalah negatif dan signifikan. Namun hasil penelitian ini tidak sama dengan hasil penelitian Anggraini (2006) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemilikan manajemen terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan, manajer perusahaan akan semakin banyak mengungkapkan informasi sosial. Hal ini mendukung teori keagenan, yaitu bahwa semakin banyak kepemilikan manajemen di dalam perusahaan, manajemen akan semakin banyak melakukan kegiatan produktif yang dapat meningkatkan *image* perusahaan.

Tingkat signifikansi komisaris independen (*BOC*) yaitu 0,751, lebih besar dari *significance level* 0,05. Jadi, hipotesis H_2 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur (INDEKS) yang terdaftar di BEI tahun 2008 adalah positif dan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen, tidak terbukti dapat meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan. Hasil penelitian ini didukung oleh teori Strandberg (2005) dalam Handajani, Sutrisno, dan Chandrarin (2009), yang menyatakan bahwa yang menjadi bahan pertimbangan dari komisaris independen adalah kompetensinya, bukan komposisinya. Kompetensi dari seorang komisaris independen yang dimaksud adalah kemampuan (*skill*) yang dimilikinya, pengetahuannya (*knowledge*), latar belakangnya (*background*), dan perbedaan kemampuan (*competency*) dalam meningkatkan kualitasnya sebagai pembuat keputusan yang berhubungan dengan CSR. Namun hasil penelitian ini tidak sama dengan hasil penelitian Nurkhin (2009) yang menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris independen memberikan pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini berarti keberadaan dewan komisaris independen di Indonesia yang diatur dengan Ketentuan Bapepam dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A tanggal 14 Juli tahun 2004 mampu memberikan monitor yang positif yaitu dalam mengawasi kegiatan manajemen dalam pengungkapan CSR. Keberadaan dewan komisaris independen dapat memberikan kontrol dan monitoring bagi manajemen dalam operasional perusahaan, termasuk dalam pelaksanaan dan pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial. Dewan komisaris independen memberikan tekanan kepada manajemen untuk melaksanakan aktivitas CSR dengan baik.

Tingkat signifikansi komite audit (*AUDCOM*) yaitu 0,389 ($\rho \geq 0,05$). Jadi, hipotesis H_3 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh komite audit terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur (*INDEKS*) yang terdaftar di BEI tahun 2008 adalah positif dan tidak signifikan. Semakin banyak jumlah komite audit (lebih dari tiga orang), tidak terbukti dapat meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur. Yang terpenting adalah kualitas dan kemampuan dari komite audit tersebut dalam internal kontrol, bukan jumlahnya. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Andayani, dkk. (2008) yang menyatakan bahwa tidak

terdapat pengaruh antara keberadaan komite audit terhadap rating *CSR* dan penelitian Mintara (2008) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara komite audit dengan pengungkapan informasi mengingat lemahnya praktik *corporate governance* di Indonesia. Menurut Alijoyo (2006), keberadaan komite audit di perusahaan publik di Indonesia hanya masih sebuah hiasan, untuk sekadar memenuhi ketentuan Bapepam saja. Namun belum secara aktif untuk meningkatkan efektifitas kerjanya dalam hal internal kontrol. Hal ini tentu saja akan memberikan dampak negatif pada aplikasi *corporate governance* dan merendahkan kualitas informasi yang diberikan perusahaan karena banyaknya kesempatan untuk memanipulasi dan memperlakukan data. Hal ini bertentangan dengan teori dasarnya, karena seharusnya keberadaan komite audit mendukung prinsip tanggung jawab dalam penerapan *corporate governance*, yang menekankan perusahaan untuk memberikan informasi lebih baik terutama keterbukaan dan penyajian yang jujur dalam laporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak sama dengan hasil penelitian Handajani, Sutrisno, dan Chandrarini (2009), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara keberadaan komite audit terhadap level pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih tinggi.

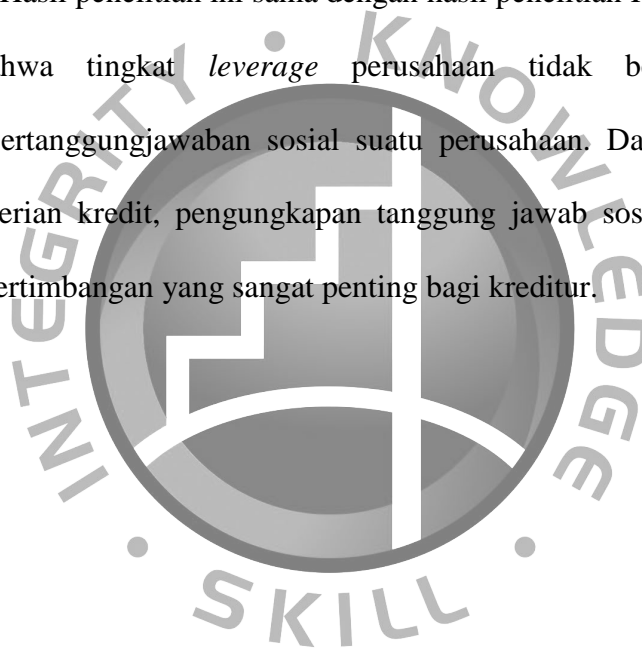
Tingkat signifikansi auditor eksternal (AUDIT) yaitu 0,044 ($\rho \leq 0,05$). Jadi, hipotesis H_4 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh auditor eksternal terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur (INDEKS) yang terdaftar di BEI tahun 2008 adalah positif dan signifikan. Perusahaan yang diaudit oleh auditor eksternal yang berafiliasi dalam KAP *Big Four*, terbukti dapat meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Barnea and Rubin (2005) yang menyatakan bahwa kualitas audit dari auditor eksternal mempengaruhi rating *CSR*. Jika kualitas audit dari auditor eksternal baik, maka akan dapat meningkatkan rating *CSR*. Argumen ini didasarkan pada

manajemen yang baik dalam sebuah perusahaan dapat meningkatkan rating *CSR*. Pada dasarnya, KAP *Big Four* memiliki kualitas audit yang lebih baik daripada KAP *Non Big Four*. Namun, hasil penelitian ini tidak sama dengan hasil penelitian Andayani, dkk. (2008) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara perusahaan yang diaudit oleh auditor eksternal yang berafiliasi dengan KAP *Big Four* atau *Non Big Four* terhadap rating *CSR*.

Tingkat signifikansi pada variabel kontrol ukuran perusahaan (*SIZE*) yang diukur dari nilai natural logaritma total aktiva perusahaan yaitu 0,041 lebih kecil dari *significance level* 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh nilai koefisien dari variabel ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur (INDEKS) yang terdaftar di BEI tahun 2008 adalah positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang berukuran lebih besar akan mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaannya lebih luas. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Sembiring (2005) yang menyatakan bahwa hasil tersebut erat kaitannya dengan teori agensi yang menyatakan bahwa semakin besar suatu perusahaan maka biaya keagenan yang muncul juga semakin besar. Untuk mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas. Selain itu, perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti, pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, hasil penelitian ini tidak sama dengan hasil penelitian Rosmasita (2007) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan (*Size*) pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh perusahaan tidak terkait dengan besar dan kecilnya *size* dari perusahaan dan penelitian Nurkhin (2009) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh bagi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, mungkin disebabkan pandangan

perusahaan ukuran besar yang belum menganggap efektifitas pengungkapan CSR. Artinya pengungkapan aktivitas ini belum dianggap sebagai kebijakan yang akan berdampak positif di masa yang akan datang.

Tingkat signifikansi pada variabel kontrol *leverage (LEV)* yaitu 0,348 ($\rho \geq 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh nilai koefisien dari variabel *leverage* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur (INDEKS) yang terdaftar di BEI tahun 2008 adalah hubungan yang bersifat positif dan tidak signifikan. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Rosmasita (2007) yang menyatakan bahwa tingkat *leverage* perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial suatu perusahaan. Dalam hal pengambilan keputusan pemberian kredit, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan bukan menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting bagi kreditur.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial, kepemilikan manajemen (KPM) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur (INDEKS) yang terdaftar di BEI pada tahun 2008. Karena kecilnya kepemilikan saham manajemen secara individual, sehingga tidak berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan perusahaan.
2. Secara parsial, dewan komisaris (*BOC*) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur (INDEKS) yang terdaftar di BEI pada tahun 2008. Karena yang menjadi bahan pertimbangan dari komisaris independen adalah kompetensinya, bukan komposisinya. Kompetensi dari seorang komisaris independen yang dimaksud adalah kemampuan (*skill*) yang dimilikinya, pengetahuannya (*knowledge*), latar belakangnya (*background*), dan perbedaan kemampuan (*competency*) dalam meningkatkan kualitasnya sebagai pembuat keputusan yang berhubungan dengan *CSR*.
3. Secara parsial, komite audit (*AUDCOM*) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur (INDEKS) yang terdaftar di BEI pada tahun 2008. Karena yang terpenting adalah kualitas dan kemampuan dari komite audit tersebut dalam internal kontrol, bukan jumlahnya.

Keberadaan komite audit di perusahaan publik di Indonesia belum secara aktif dapat meningkatkan efektifitas kinerjanya dalam hal internal kontrol.

4. Secara parsial, auditor eksternal (AUDIT) berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur (INDEKS) yang terdaftar di BEI pada tahun 2008. Pada dasarnya, KAP *Big Four* memiliki kualitas audit yang lebih baik daripada KAP *Non Big Four*. Jika kualitas audit dari auditor eksternal baik, maka akan dapat meningkatkan rating *CSR*. Argumen ini didasarkan pada manajemen yang baik dalam sebuah perusahaan dapat meningkatkan rating *CSR*.
5. Secara simultan atau bersama-sama, variabel independen mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi variabel dependen.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik, antara lain :

1. Subyektifitas dalam pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial tidak dapat dihindari sehingga kemungkinan terjadi bias dalam pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial.
2. Penelitian ini hanya menggunakan satu jenis industri sebagai sampelnya, yaitu industri manufaktur, sehingga perusahaan yang dijadikan sampel tidak dapat mewakili keseluruhan perusahaan yang ada di Indonesia.
3. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini relatif sedikit, yaitu sebanyak 84 perusahaan dari 138 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat ditarik beberapa saran sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan atau menggunakan variabel lain untuk menemukan suatu model standar pendugaan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur, seperti kepemilikan institutional, struktur kepemilikan, ukuran dewan komisaris, dan profitabilitas.
- b. Agar pengukuran tanggung jawab sosial perusahaan lebih baik dan dapat dijelaskan untuk seluruh industri yang ada, maka untuk penelitian selanjutnya sampel yang digunakan tidak hanya pada industri manufaktur saja, melainkan seluruh industri yang terdaftar di BEI.

2. Manajemen

Bagi manajemen perusahaan, khususnya perusahaan manufaktur diharapkan lebih meningkatkan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaannya, sehingga semakin banyak *item-item* yang akan diungkapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alijoyo, Antonius, dan Subarto Zaini. (2004). *Komisaris Independen Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*. Jakarta : PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Amalia, Dessy. (2005). "Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure) pada Laporan Tahunan Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta". *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 1, No. 2, November 2005.
- Andayani, Wuryan, *et al.* (2008). "Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance and The Intellectual Property : an External Strategy of The Management to Increase The Company's Value". *National Conference on Management Research 2008*. Makassar, 27 November 2008.
- Anggraini, FR. Reni Retno. (2006). "Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta)". *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang, 23-26 Agustus.
- Arifin. (2005). "Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)". *Disampaikan Pada Sidang Senat Guru Besar Universitas Diponegoro Dalam Rangka Pengusulan Jabatan Guru Besar*. Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Barnea, Amir and Amir Rubin. (2005). "Corporate Social Responsibility as a Conflict between Shareholders". *Working Paper Series*. October 13p.1-36.
- Emirson, Joni. (2006). "Regulatory Driven dalam Implementasi Prinsip - Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia". *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*, Vol. 4, No.8 Desember 2006.
- Fauzi, H., Lois Mahoney, dan Azhar Abdul Rahman. (2007). "Institutional Ownership and Corporate Social Performance : Empirical Evidence from Indonesian Companies". *Issues in Social and Environmental Accounting*, Vol. 1, No. 2 Desember 2007, pp.334–347.
- Ghozali, Imam. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Cetakan IV*. Semarang : Universitas Diponegoro.

- Hackston, David and Milne, Marcus J. (1996). "Some Determinants Of Social And Environmental Disclosures In New Zealand Companies", *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 9, No. 1, pp. 77-108.
- Handajani, L., Sutrisno, dan Grahita Chandrarin. (2009). "The Effects of Earnings Management and Corporate Governance Mechanism on Corporate Social Responsibility Disclosure : An Empirical Study at Public Companies in Indonesia Stock Exchange". *The Indonesian Journal of Accounting Research*. Vol. 12, No. 3 September 2009, pp. 233-248.
- Hidayah, Erna. (2008). "Pengaruh Kualitas Pengungkapan Informasi Terhadap Hubungan Antara Penerapan Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan di Bursa Efek Jakarta". *JAAI*, Vol.12, No. 1, Juni 2008, pp. 53-64.
- Hidayat, Taufik. (2009). "Pengaruh Praktek Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di BEI". *Skripsi Sarjana*. Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Mintara, Yunita Heryani. (2008). "Pengaruh Implementasi Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Informasi". *Skripsi Sarjana*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Murwaningsari, Etty. (2009). "Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Continuum". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.11, No. 1 Mei 2009, pp. 30-41.
- Nurkhin, Ahmad. (2009). "Corporate Governance dan Profitabilitas ; Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia)". *Skripsi Sarjana*. Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Nuryaman. (2009). "Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sukarela". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 6, No. 1, Juni 2009.
- Priantara, Diaz. (2002). "Peran Akuntan Perusahaan pada Good Corporate Governance". *Jurnal Akuntansi*, Th.VI, 1 Mei 2002.

Rosmasita, Hardhina. (2007). “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sosial (Social disclosure) dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta”. *Skripsi Sarjana*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Sembiring, Edy Rismanda. (2005). “Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial : Studi Empiris Pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta”. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Solo, 15-16 September.

Suharto, Edi. (2008). “Corporate Social Responsibility : What is and Benefits for Corporate”. *Seminar Dua Hari CSR (Corporate Social Responsibility): Strategy, Management and Leadership*. Jakarta, 13-14 February 2008.

Sulastini, Sri. (2007). “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Social Disclosure Perusahaan Manufaktur yang Telah Go Public”. *Skripsi Sarjana*. Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Syakhroza, Akhmad. (2003). “Best Practice Corporate Governance dalam Konteks Kondisi Lokal Perbankan Indonesia”. *Usahawan*, No.06, Th.XXXII, Juni 2003.

Wardani, Diah Kusuma. (2008). “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan di Indonesia”. *Skripsi Sarjana*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Wardhani, Ratna. (2006). “Mekanisme Corporate Governance dalam Perusahaan Yang Mengalami Permasalahan Keuangan (Financially Distressed Firms)”. *Makalah SNA IX*.

<http://www.kemitraan.or.id/newsroom/media-news/implementasi-good-corporate-governance-melalui-corporate-social-responsibility/>.

<http://www.cipe.org/events/speaker/baird.php3>

Tabel *Descriptive Statistics*

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
	INDEKS	84	.00	.87	.3554
KPM	84	.0000	.7000	.027197	.0894617
BOC	84	.25	1.00	.4180	.14944
SIZE	84	24.48	32.02	27.8592	1.46957
LEV	84	.09	2.88	.6128	.44763
Valid N (listwise)	84				

Sumber : Data yang diolah

AUDCOM

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	77	91.7	91.7	91.7
	1	7	8.3	8.3	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

Sumber : Data yang diolah

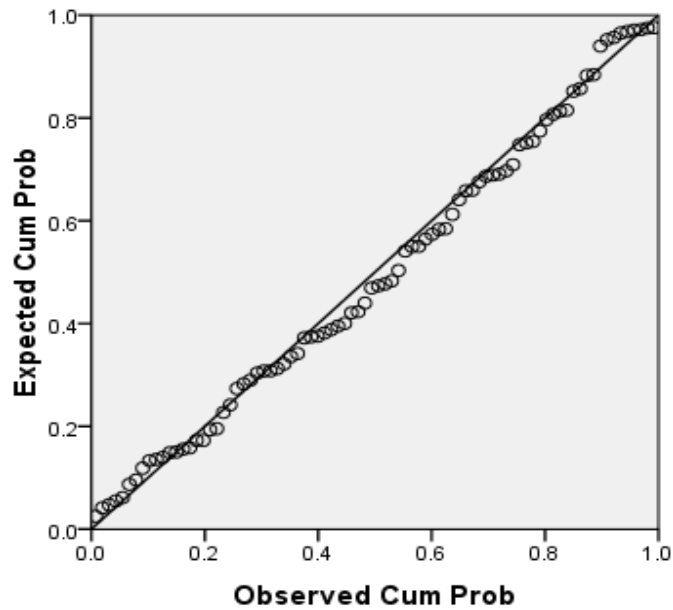
AUDIT

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	44	52.4	52.4	52.4
	1	40	47.6	47.6	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

Sumber : Data yang diolah

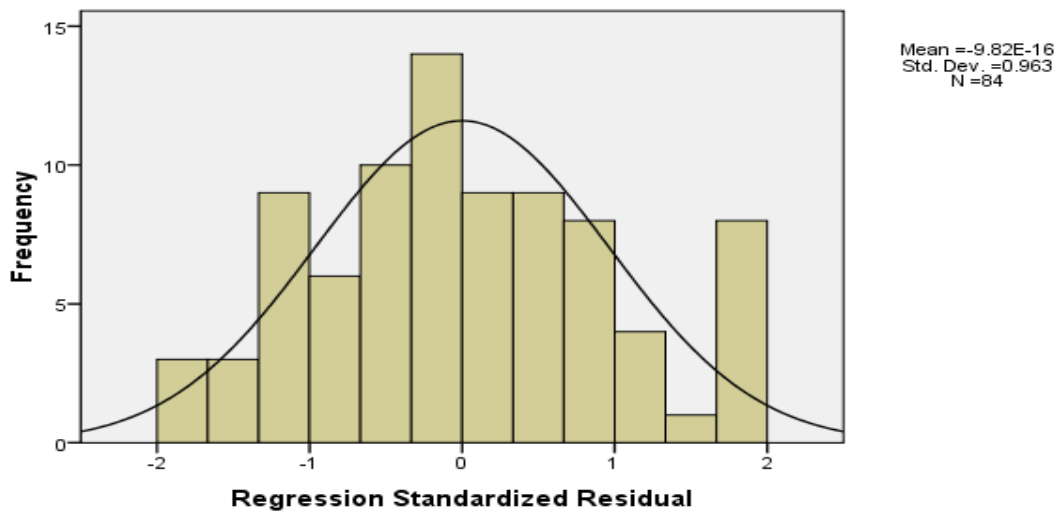
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: INDEKS



Histogram

Dependent Variable: INDEKS



Tabel Kolmogorov - Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		84
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.19543382
Most Extreme Differences	Absolute	.056
	Positive	.056
	Negative	-.054
Kolmogorov-Smirnov Z		.514
Asymp. Sig. (2-tailed)		.954

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data yang diolah

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

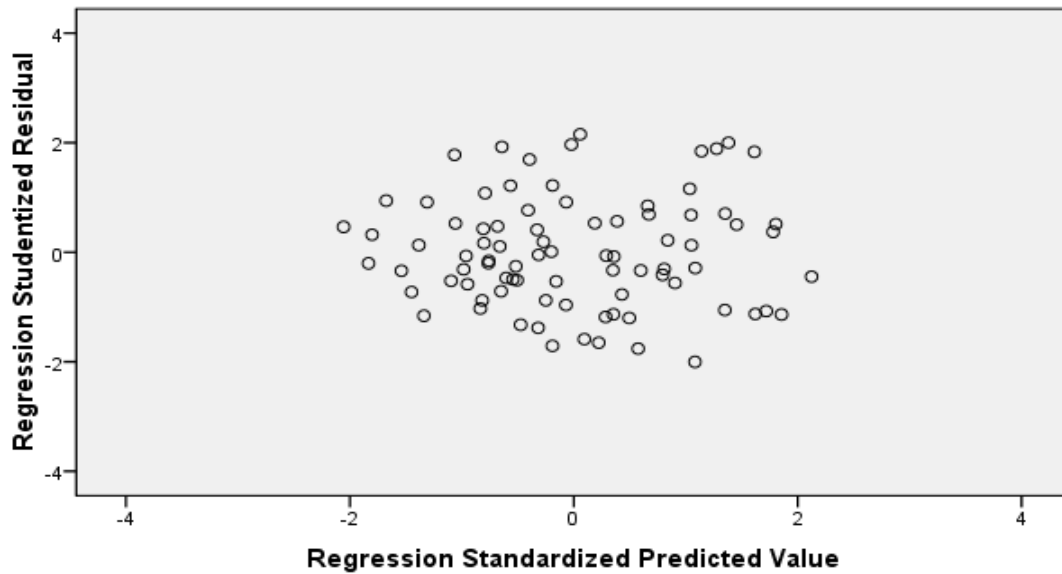
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.625	.456		-1.373	.174		
KPM	.030	.268	.013	.113	.910	.863	1.159
BOC	.049	.153	.034	.319	.751	.946	1.057
AUDCOM	-.072	.083	-.093	-.867	.389	.941	1.062
AUDIT	.101	.050	.239	2.046	.044	.802	1.247
SIZE	.034	.016	.234	2.083	.041	.862	1.160
LEV	-.049	.052	-.103	-.945	.348	.923	1.084

a. Dependent Variable: INDEKS

Sumber : Data yang diolah

Scatterplot

Dependent Variable: INDEKS



Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.170	.244		-.695	.489		
KPM	-.155	.144	-.121	-1.076	.285	.863	1.159
BOC	-.134	.082	-.175	-1.626	.108	.946	1.057
AUDCOM	-.013	.044	-.033	-.301	.764	.941	1.062
AUDIT	.040	.027	.178	1.517	.133	.802	1.247
SIZE	.012	.009	.161	1.429	.157	.862	1.160
LEV	.035	.028	.138	1.260	.211	.923	1.084

a. Dependent Variable: ABSUT

Uji Adjusted R-Square dan Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.399 ^a	.159	.094	.20291	2.008

a. Predictors: (Constant), LEV, SIZE, BOC, AUDCOM, KPM, AUDIT

b. Dependent Variable: INDEKS

Sumber : Data yang diolah

Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.600	6	.100	2.431	.033 ^a
	Residual	3.170	77	.041		
	Total	3.771	83			

a. Predictors: (Constant), LEV, SIZE, BOC, AUDCOM, KPM, AUDIT

b. Dependent Variable: INDEKS

Sumber : Data yang diolah

Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.625	.456		-1.373	.174
	KPM	.030	.268	.013	.113	.910
	BOC	.049	.153	.034	.319	.751
	AUDCOM	-.072	.083	-.093	-.867	.389
	AUDIT	.101	.050	.239	2.046	.044
	SIZE	.034	.016	.234	2.083	.041
	LEV	-.049	.052	-.103	-.945	.348

a. Dependent Variable: INDEKS

Sumber : Data yang diolah

Daftar *Item* Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Sukarela Perusahaan Manufaktur

• LINGKUNGAN

- a. Menerima penghargaan yang berhubungan dengan program atau kebijakan perusahaan mengenai lingkungan.
- b. Pengeluaran modal, penelitian, dan pengembangan untuk mengurangi polusi.
- c. Menggunakan material daur ulang.
- d. Mendukung kampanye anti pembuangan sampah sembarangan.
- e. Merancang fasilitas yang serasi dengan lingkungan.
- f. Berkontribusi baik dalam bentuk uang ataupun barang seni dalam upaya memperindah lingkungan.
- g. Menjaga bangunan atau benda – benda bersejarah.
- h. Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas.

• PRODUK

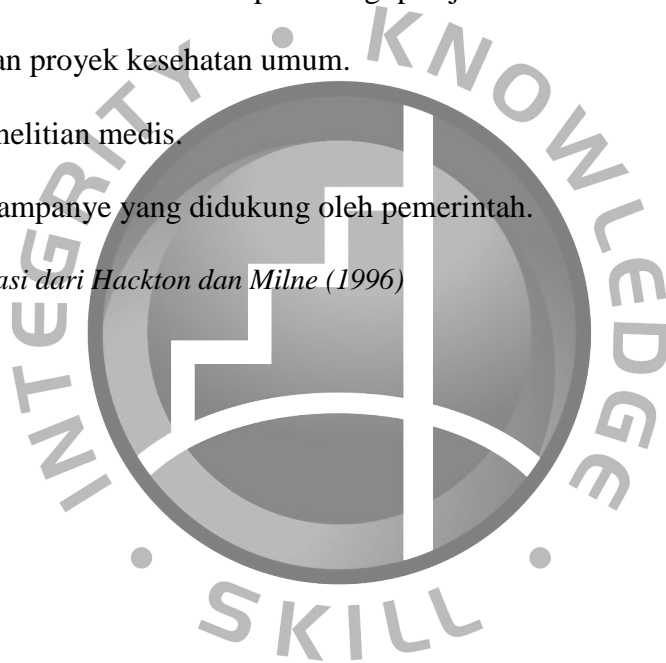
- a. Informasi mengenai kualitas dari produk yang dihasilkan tercermin dari penghargaan yang diterima.
- b. Informasi mengenai pengembangan yang berhubungan dengan produk – produk yang dihasilkan, termasuk di dalamnya adalah pengemasan. Contoh : bagaimana membuat kemasan dapat digunakan kembali atau daur ulang.
- c. Jumlah atau persentase dari pengeluaran yang dialokasikan kepada penelitian dan pengembangan dan manfaat yang didapatkan dari pengeluaran tersebut.
- d. Informasi dari proyek penelitian yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk.

- e. Melakukan penelitian terhadap keamanan dari produk perusahaan.
- f. Mengungkapkan dengan baik prosedur kebersihan dalam mempersiapkan dan memproses barang atau produk.
- g. Informasi yang dapat diverifikasi bahwa kualitas produk lebih meningkat (ISO : 9000).

- **KETERLIBATAN DALAM KOMUNITAS**

- a. Magang paruh waktu atau musim panas bagi pelajar.
- b. Mensponsorkan proyek kesehatan umum.
- c. Membantu penelitian medis.
- d. Mendukung kampanye yang didukung oleh pemerintah.

Sumber: Dimodifikasi dari Hackton dan Milne (1996)



Perusahaan Manufaktur yang Dijadikan Sampel Penelitian

No	Nama Perusahaan	
1	PT Ades Waters Indonesia Tbk	ADES
2	PT Alumindo Light Metal Industry Tbk	ALMI
3	PT Aneka Kemasindo Utama Tbk	AKKU
4	PT Argha Karya Prima Industry Tbk	AKPI
5	PT Argo Pantes Tbk	ARGO
6	PT Arwana Citramulia Tbk	ARNA
7	PT Asahimas Flat Glass Tbk	AMFG
8	PT Asioplast Industries Tbk	APLI
9	PT Astra International Tbk	ASII
10	PT Astra Otoparts Tbk	AUTO
11	PT Aqua Golden Mississippi Tbk	AQUA
12	PT Barito Pacific Tbk	BRPT
13	PT Bentoel International Investama Tbk	RMBA
14	PT Beton Jaya Manunggal Tbk	BTON
15	PT Budi Acid Jaya Tbk	BUDI
16	PT Cahaya Kalbar Tbk	CEKA
17	PT Centex Tbk	CNTX
18	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	CPIN
19	PT Citra Tubindo Tbk	CTBN
20	PT Darya-Varya Laboratoria Tbk	DVLA
21	PT Davomas Abadi Tbk	DAVO
22	PT Eterindo Wahanatama Tbk	ETWA
23	PT Fajar Surya Wisesa Tbk	FASW
24	PT Gajah Tunggal Tbk	GJTL
25	PT Goodyear Indonesia Tbk	GDYR
26	PT Gudang Garam Tbk	GGRM
27	PT HM Sampoerna Tbk	HMSP
28	PT Holcim Indonesia Tbk	SMCB
29	PT Indah Kiat Pulp & Kertas Tbk	INKP
30	PT Indal Aluminium Industry Tbk	INAI
31	PT Indo Acidatama Tbk	SRSN
32	PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk	INTP
33	PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	IMAS
34	PT Indorama Synthetics Tbk	INDR
35	PT Indospring Tbk	INDS
36	PT Intanwijaya International Tbk	INCI
37	PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk	IKAI
38	PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	JKSW
39	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	JAPFA
40	PT Jaya Pari Steel Tbk	JPRS
41	PT Jemblo Cable Company Tbk	JECC
42	PT Kabelindo Murni Tbk	KBLM
43	PT Kalbe Farma Tbk	KLBF

44	PT Karwell Indonesia Tbk	KARW
45	PT Keramik Indonesia Assosiasi Tbk	KIAS
46	PT Kimia Farma Tbk	KAEF
47	PT KMI Wire & Cable Tbk	KBLI
48	PT Langgeng Makmur Industri Tbk	LMPI
49	PT Lion Metal Works Tbk	LION
50	PT Lionmesh Prima Tbk	LMSH
51	PT Mandom Indonesia Tbk	TCID
52	PT Mayora Indah Tbk	MYOR
53	PT Merck Tbk	MERK
54	PT Multistrada Arah Sarana Tbk	MASA
55	PT Mustika Ratu Tbk	MRAT
56	PT Nipress Tbk	NIPS
57	PT Pan Brothers Tex Tbk	PBRX
58	PT Panasia Indosyntec Tbk	HDTX
59	PT Polychem Indonesia Tbk	ADMG
60	PT Polysindo Eka Perkasa Tbk	POLY
61	PT Prasadha Aneka Niaga Tbk	PSDN
62	PT Pyridam Farma Tbk	PYFA
63	PT Ratu Prabu Energi Tbk	ARTI
64	PT Roda Vivatex Tbk	RDTX
65	PT Sat Nusapersada Tbk	PTSN
66	PT Selamat Sempurna Tbk	SMSM
67	PT Semen Gresik Tbk	SMGR
68	PT Sepatu Bata Tbk	BATA
69	PT Sierad Produce Tbk	SIPD
70	PT Sorini Agro Asia Corporinndo Tbk	SOBI
71	PT Sucaco Tbk	SCCO
72	PT Suparma Tbk	SPMA
73	PT Surabaya Agung Industry Pulp Tbk	SAIP
74	PT Surya Toto Indonesia Tbk	TOTO
75	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	AISA
76	PT Tirta Mahakam Resources Tbk	TIRT
77	PT Trias Sentosa Tbk	TRST
78	PT Try Polyta Indonesia Tbk	TPIA
79	PT Tunas Alfin Tbk	TALF
80	PT Ultra Jaya Milk Tbk	ULTJ
81	PT Unggul Indah Cahaya Tbk	UNIC
82	PT Unilever Indonesia Tbk	UNVR
83	PT Unitex Tbk	UNTX
84	PT Voksel Electric	VOKS

I. PERSONAL

Name : Larisa Rahman
NPM : 200612043
Place / Date of Birth : Jakarta / 11 July 1988
Gender : Woman
Religion : Islam
Address : Jalan Tanah Kusir II RT.012 RW.011 No.7
Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12240
Telephone Number : 021 – 7257016
Email : larisa_rahman@yahoo.co.id
GPA : 3.56

II. FORMAL EDUCATION

2006 – 2010 : STIE *Indonesia Banking School*
2003 – 2006 : SMUN 46 Jakarta
2000 – 2006 : SMPN 19 Jakarta
1994 – 2000 : SDN Gandaria Utara 08 Pagi

III. INFORMAL EDUCATION

1. *Training Trade Financing* pada 27 Januari – 28 Januari 2010
2. *Visiting Researcher* Bank Syariah Mandiri pada tahun 2009
3. *Training Analisis Kredit* pada 21 Agustus dan 24 Agustus 2009
4. Kuliah umum dengan tema "*Bank Fraud*" pada 1 Mei 2009
5. Kuliah umum dengan tema "*Tindak Pidana Perbankan, Korupsi, dan Pencucian Uang*" pada 1 Mei 2009
6. *Training Basic Treasury* pada 19 Januari – 21 Januari 2009
7. Magang di Bank Indonesia Pusat pada 18 Juni – 27 Juni 2008

8. *Training Costumer Services & Selling Skill* pada 29 Januari – 31 Januari 2008
9. Magang di BPR. Dhaha Ekonomi Kodya Kediri pada 12 Juni – 15 Juni 2007
10. *Training Service Excellence* pada 30 Januari – 1 Februari 2007
11. *English Course (The British Institute)* pada 2006 – 2009

